

Katalog: 7203005.33



Statistik

# KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE JAWA TENGAH 2018-2020



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ayo  
Hidup Sehat  
Mulai Dari Kita

*Statistik*

# KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE JAWA TENGAH 2018-2020

# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH 2018-2020

ISSN : 2407-344X  
Katalog : 7203005.33  
No. Publikasi : 33000.2177  
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 106 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh:  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :  
CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

## KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2018-2020 sebagai kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Buku ini memberi gambaran Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berguna sebagai sumber informasi, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Di samping itu, data yang tersaji dalam publikasi ini juga dapat digunakan untuk melengkapi berbagai keperluan penyusunan statistik, misalnya untuk keperluan penghitungan Pendapatan Nasional/Regional, Neraca Sektor Publik, Tabel Input - Output dan lain-lain.

Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari Biro/Bagian Keuangan Kantor Gubernur / Bupati / Walikota di Jawa Tengah yang dikumpulkan oleh petugas BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan menggunakan daftar yang khusus disusun oleh BPS RI.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat dihargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Semarang, Desember 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Tengah



Adhi Wiriana



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
I. PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Ruang Lingkup .....	4
II. KONSEP dan DEFINISI .....	7
2.1. Anggaran/Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah .....	7
2.1.1. Pendapatan Daerah .....	7
2.1.2. Belanja Daerah .....	10
2.2. Anggaran/Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....	14
2.2.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	14
2.2.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	15
III. ULASAN RINGKAS .....	17
3.1. Penerimaan Daerah .....	20
3.1.1. Pendapatan Asli Daerah .....	21
3.1.2. Dana Perimbangan .....	22
3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah .....	23
3.1.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	24
3.2. Belanja Daerah .....	24
3.2.1. Belanja Tidak Langsung .....	25
3.2.2. Belanja Langsung .....	26
3.2.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	28
LAMPIRAN .....	31

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (dalam trilyun Rp), 2018-2020	20
Tabel 2	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Menurut Komponen Penyusunnya (dalam trilyun Rp), 2018-2020	21
Tabel 3	Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Menurut Komponen Penyusunnya (dalam trilyun Rp), 2018-2020	23
Tabel 4	Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Menurut Jenis Se Jawa Tengah Pengeluaran (dalam trilyun Rp), 2018-2020	25
Tabel 5	Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Menurut Jenis Se Jawa Tengah Pengeluaran (dalam trilyun Rp), 2018-2020	26
Tabel 6	Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Menurut Jenis Se Jawa Tengah Pengeluaran (dalam trilyun Rp), 2018-2020	28

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 33
Lampiran 2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 34
Lampiran 3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan(dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 35
Lampiran 4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 36
Lampiran 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 37
Lampiran 6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 38
Lampiran 7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 39
Lampiran 8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 40
Lampiran 9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 41
Lampiran 10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 42
Lampiran 11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 43
Lampiran 12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 44
Lampiran 13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 45
Lampiran 14	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 46



	Halaman
Lampiran 15	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 47
Lampiran 16	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 48
Lampiran 17	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 49
Lampiran 18	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 50
Lampiran 19	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018 - 2020 ..... 51
Lampiran 20	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 52
Lampiran 21	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 53
Lampiran 22	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 54
Lampiran 23	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 55
Lampiran 24	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 56
Lampiran 25	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 57
Lampiran 26	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 58
Lampiran 27	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 59
Lampiran 28	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 60
Lampiran 29	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 61

	Halaman
Lampiran 30	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 62
Lampiran 31	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 63
Lampiran 32	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 64
Lampiran 33	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 65
Lampiran 34	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 66
Lampiran 35	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 67
Lampiran 36	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 68
Lampiran 37	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 69
Lampiran 38	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 70
Lampiran 39	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 71
Lampiran 40	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 72
Lampiran 41	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 73
Lampiran 42	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 74
Lampiran 43	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 75
Lampiran 44	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 76

	Halaman
Lampiran 45	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 77
Lampiran 46	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 78
Lampiran 47	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 79
Lampiran 48	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 80
Lampiran 49	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 81
Lampiran 50	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 82
Lampiran 51	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 83
Lampiran 52	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 84
Lampiran 53	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 85
Lampiran 54	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 86
Lampiran 55	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 87
Lampiran 56	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 88
Lampiran 57	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 89
Lampiran 58	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 90
Lampiran 59	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 91

	Halaman
Lampiran 60	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 92
Lampiran 61	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 93
Lampiran 62	Realisas Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 94
Lampiran 63	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 95
Lampiran 64	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 96
Lampiran 65	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 97
Lampiran 66	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Sukrakarta Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 98
Lampiran 67	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 99
Lampiran 68	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 100
Lampiran 69	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 101
Lampiran 70	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 102
Lampiran 71	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 103
Lampiran 72	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 104
Lampiran 73	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Penerimaan (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 105
Lampiran 74	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (dalam ribuan Rp), 2018- 2020 ..... 106



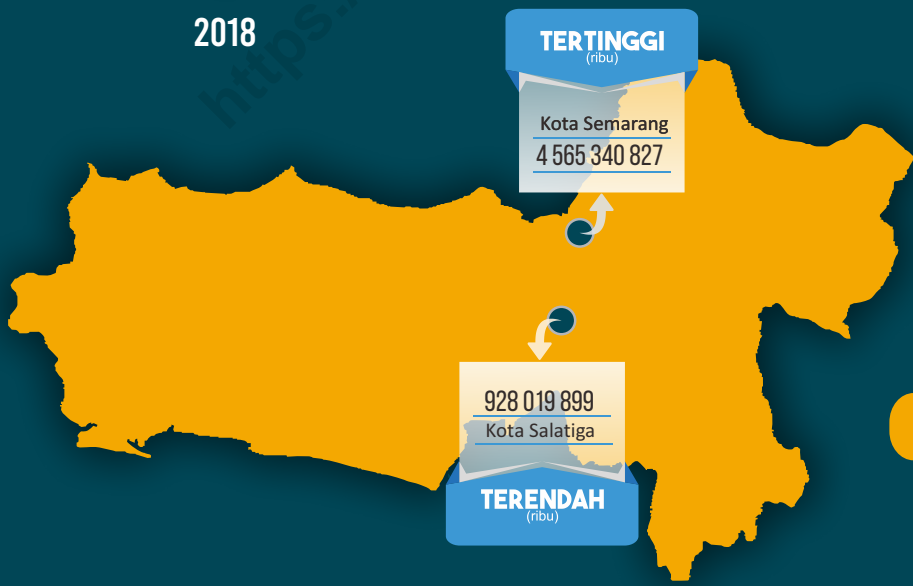


*Realisasi*

# PENDAPATAN DAERAH KAB/KOTA SE JAWA TENGAH

## 2018-2020\*

\* (APBD)



2019

*babl*

# PENDAHULUAN



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 serta UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga merupakan kewajiban yang harus dibuat setiap akhir pelaksanaan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.



## 1.2. TUJUAN

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

## 1.3. RUANG LINGKUP

Survei ini dilakukan di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Se Jawa Tengah atau dengan kata lain pencacahan dilakukan secara lengkap di 35 Kabupaten/Kota dan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang dikumpulkan hanya sebatas mengenai Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

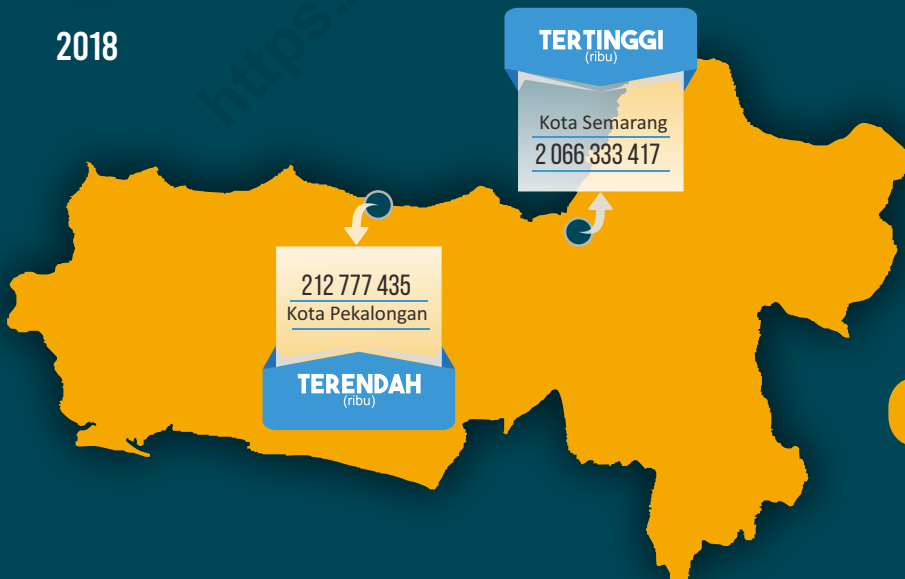
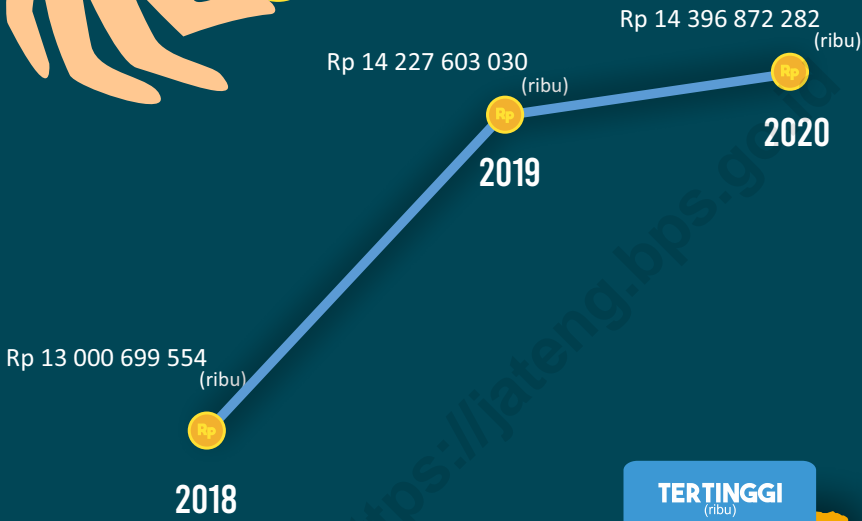


Realisasi

# PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB/KOTA SE JAWA TENGAH

## 2018-2020\*

\* (APBD)



2019

**bab 2**

# KONSEP DEVINISI



## II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi serta format daftar pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data Statistik Keuangan Pemerintah mengacu pada format pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

### 2.1. ANGGARAN/REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

#### Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya, terdiri dari :

##### a. Pajak Daerah

Merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

**b. Retribusi Daerah**

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

**Rincian 2 Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari :

**a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

**a.1. Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

**a.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

**b. Dana Alokasi Umum (DAU),**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK).**

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional

- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

### **Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

## **2.1.2. BELANJA DAERAH**

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

### **Rincian 1 Belanja Tak Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari :

#### **a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan

penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

**b. Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**c. Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

**d. Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

**e. Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa,



atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

#### **g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

#### **h. Belanja Tak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/terjadi kembali seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **Rincian 2 Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja langsung terdiri dari :

### **a. Belanja Pegawai**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

### **c. Belanja Modal**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

## **2.2. ANGGARAN / REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**

Digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

### **2.2.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari:

#### **1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)**

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

#### **2. Pencairan Dana Cadangan**

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

#### **3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **4. Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

#### **5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

#### **6. Penerimaan Piutang Daerah.**

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

### **2.2.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

#### **1. Pembentukan Dana Cadangan**

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

#### **2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman Modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

### **3. Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

### **4. Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

### **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

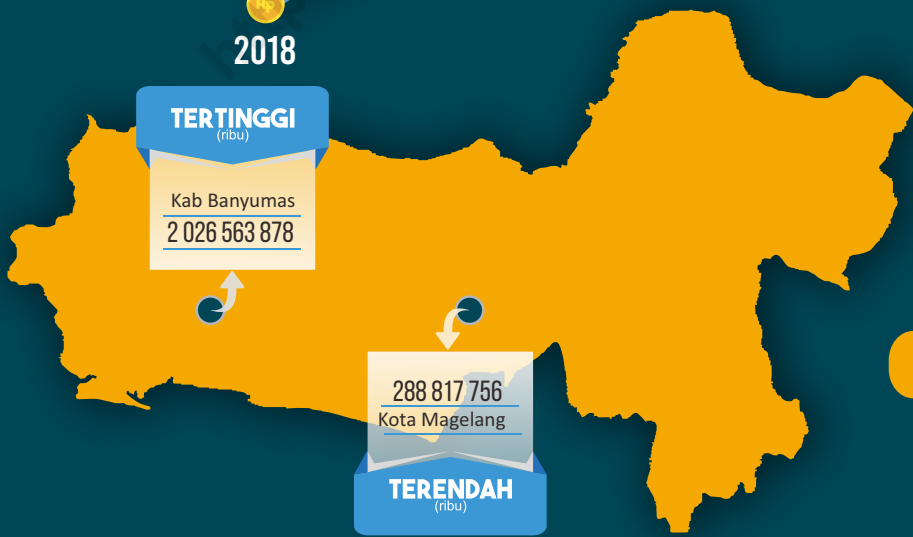
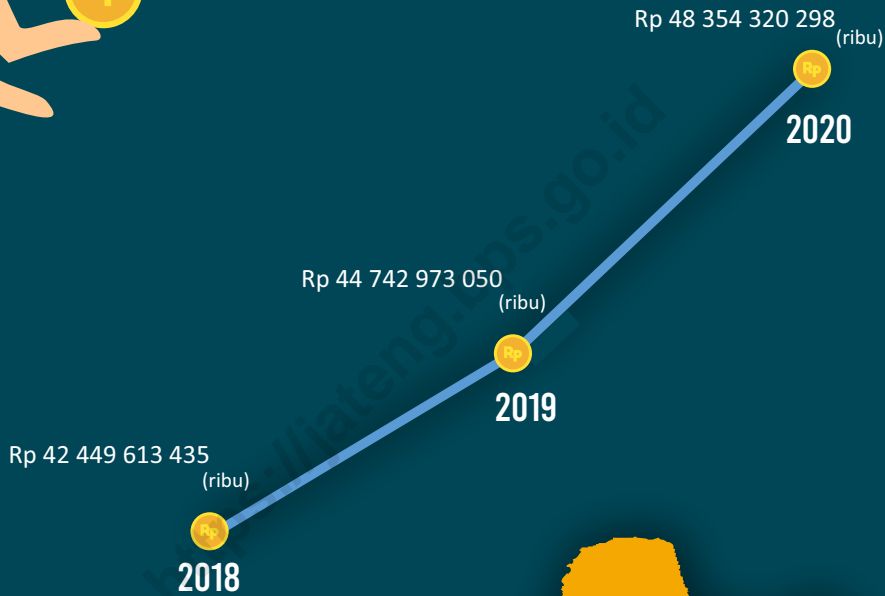


*Realisasi*

# BELANJA TIDAK LANGSUNG KAB/KOTA SE JAWA TENGAH

## 2018-2020\*

\* (APBD)



2019

*bab 3*

# ULASAN RINGKAS



### III. ULASAN RINGKAS

Pembangunan daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya terdapat proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Interaksi yang terjadi harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Otonomi yang telah berlangsung semenjak tahun 2001 menjadikan pemerintah daerah semakin dekat berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat.

Melalui otonomi, pemerintah daerah mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan karakteristik daerah, serta mengelola daerahnya sesuai kepentingan, kebutuhan dan prioritas utama masing masing. Selain itu pemerintah daerah dapat memobilisasi sumber daya secara mandiri dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah.

Salah satu wujud pemberian otonomi adalah kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi penting sebagai salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Peluang ini akan semakin besar jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Pembiayaan pembangunan daerah terdiri dari beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pendapatan asli daerah mampu untuk mencukupi pembiayaan



pembangunan daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

### 3.1. PENERIMAAN DAERAH

Penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam APBD termuat rincian atas Penerimaan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Daerah itu sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan data APBD 2020 penerimaan Provinsi Jawa Tengah sebesar 29,11 trilyun rupiah. Besaran penerimaan APBD 2020 ini disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,99 trilyun rupiah (54,95 persen), Dana Perimbangan 12,21 trilyun rupiah (41,97 persen), Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 9 milyar rupiah (0,32 %) dan Pembiayaan Daerah sebesar 81 milyar rupiah (2,77 persen).

Jika dibandingkan dengan data realisasi APBD 2019, maka besaran penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 5,88 persen, dari 27,49 trilyun rupiah menjadi 29,11 trilyun rupiah.

Tabel 1.  
Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (trilyun Rp), 2019-2020

Jenis Penerimaan	Provinsi Jawa Tengah		Kab/Kota Se Jawa Tengah	
	2019	2020*)	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	<b>25,86</b>	<b>28,30</b>	<b>80,18</b>	<b>80,08</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	14,44	16,00	14,23	14,40
2. Dana Perimbangan	11,33	12,21	47,15	47,66
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,09	0,09	18,80	18,02
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	<b>1,63</b>	<b>0,81</b>	<b>6,55</b>	<b>4,63</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>27,49</b>	<b>29,11</b>	<b>86,73</b>	<b>84,71</b>

\*) Data APBD

Jumlah penerimaan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah berdasarkan data APBD 2020 sebesar 84,71 triliun rupiah. Besarnya penerimaan seluruh Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah ini disumbang PAD sebesar 14,44 triliun rupiah (17,00 persen), Dana Perimbangan 47,66 triliun rupiah (56,26 persen), Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 18,02 triliun rupiah (21,28 %) dan Pembiayaan Daerah sebesar 4,63 triliun rupiah (5,47%).

Jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah berdasarkan data realisasi APBD 2019, maka besaran Penerimaan Daerah ini mengalami penurunan sebesar 2,33 persen, dari 86,73 triliun rupiah menjadi 84,71 triliun rupiah.

### 3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan perannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan sehingga tidak selalu tergantung bantuan pemerintah pusat.

Tabel 2.  
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Menurut Komponen Penyusunnya (trilyun Rp), 2019-2020

	Jenis Penerimaan	Provinsi Jawa Tengah		Kab/Kota Se Jawa Tengah	
		2019	2020*)	2019	2020*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pajak Daerah	11,95	13,44	5,64	5,58
2.	Retribusi Daerah	0,12	0,13	0,85	1,03
3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,51	0,52	0,58	0,62
4.	Lain-lain PAD yang Sah	1,86	1,90	7,16	7,17
	<b>JUMLAH</b>	14,44	15,99	14,23	14,40

\*) Data APBD

Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD mengindikasikan daerah tersebut telah mampu memanfaatkan potensi pendapatan secara optimal. Peningkatan PAD

biasanya ditunjang dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diservikasi pada sumber penerimaan daerah meliputi: Penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sementara jika memperhatikan komponen PAD APBD 2020 pada penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan dibanding realisasi APBD 2019 sebesar 1,19 persen dari 14,23 trilyun rupiah menjadi 14,40 trilyun rupiah.

Porsi PAD pada penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah pada APBD 2020 terbesar disumbang oleh Lain-lain PAD yang Sah sebesar 7,17 trilyun rupiah, diikuti penerimaan Pajak Daerah sebesar 5,58 trilyun rupiah, Retribusi Daerah sebesar 1,03 trilyun rupiah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 62 milyar rupiah.

### **3.1.2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 3 Tahun 2003). Tujuan diberikannya Dana Perimbangan untuk membantu mendanai kewenangannya, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu i) Dana Bagi hasil berupa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, ii) Dana Alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

Pada APBD 2020 jumlah Dana Perimbangan yang diharapkan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,21 trilyun rupiah. Jumlah ini meningkat 7,76 persen jika dibandingkan periode sebelumnya sebesar 11,33 trilyun rupiah. Komponen terbesar Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah 2020 berasal dari DAK mencapai 62,28 persen atau sebesar 7,61 trilyun rupiah. Sementara dari DAU, sumbangan terhadap Dana Perimbangan mencapai 31,36 persen atau sebesar 3,83

trilyun rupiah. Sisanya disumbang oleh komponen Bagi Hasil baik Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya mencapai 6,36 persen atau sebesar 7,77 milyar rupiah.

Tabel 3.  
Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Menurut Komponen Penyusunnya (dalam trilyun Rp), 2019-2020

Jenis Penerimaan		Provinsi Jawa Tengah		Kab/Kota Se Jawa Tengah	
		2019	2020*)	2019	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bagi Hasil Pajak	0,56	0,76	1,22	1,50
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber daya Alam	0,01	0,01	0,14	0,08
3.	Dana Alokasi Umum	3,79	3,83	35,06	35,16
4.	Dana Alokasi Khusus	6,97	7,61	10,74	10,92
<b>JUMLAH</b>		<b>11,33</b>	<b>12,21</b>	<b>47,16</b>	<b>47,66</b>

\*) Data APBD

Porsi Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Pada APBD 2020 Dana Perimbangan yang diterima sebesar 47,66 trilyun rupiah, meningkat jika dibandingkan realisasi APBD 2019 sebesar 47,16. Komponen terbesar Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah APBD 2020 berasal dari DAU mencapai 73,78 persen sebesar 35,16 trilyun rupiah. Sementara sumbangan DAK sebesar 22,90 persen sebesar 10,92 trilyun rupiah.

### 3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jenis Penerimaan ini terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan 6 milyar rupiah dari 87 milyar pada 2019 menjadi 93 milyar rupiah pada 2020. Sementara untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 18,80 triliun rupiah pada 2019 menjadi 18,02 triliun rupiah pada 2020 (Tabel 1).

#### **3.1.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada APBD 2020 dianggarkan turun dibandingkan dengan realisasi APBD 2019, yaitu dari 1,63 triliun rupiah menjadi 0,81 triliun rupiah, atau turun sebesar 2,77 persen (Tabel.1)

### **3.2. BELANJA DAERAH**

Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada APBD 2019 dianggarkan meningkat sebesar 5,88 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung diperkirakan meningkat dari 18,77 triliun rupiah pada realisasi APBD 2019 menjadi 19,91 triliun rupiah pada APBD 2020 atau naik sebesar 6,10 persen. Begitu juga Belanja Langsung ditargetkan naik dari 7,38 triliun rupiah menjadi 9,12 triliun rupiah atau naik sebesar 23,44 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD 2020 ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 1,34 triliun rupiah pada 2019 menjadi 80 milyar rupiah. Penurunan yang drastis antara realisasi dan anggaran tahun berikutnya untuk komponen Pembiayaan Daerah selalu berlangsung setiap tahun, karena anggaran belanja daerah yang tidak terserap akan menjadi sisa lebih anggaran tahun berjalan, yang dalam konsep masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan daerah.

Dilihat dari kontribusinya, Belanja Tidak Langsung memiliki kontribusi terbesar dalam realisasi APBD 2019 dengan kontribusi sebesar 68,27 persen. Persentasenya meningkat pada APBD 2020 menjadi sebesar 68,41 persen. Peningkatan ini lebih

dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi pada Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Sementara kontribusi Belanja Langsung pada 2019 sebesar 26,86 persen, dan pada APBD 2020 kontribusinya meningkat cukup tinggi menjadi 31,32 persen dengan harapan bahwa peningkatan Belanja Langsung tersebut dapat memacu aparatur daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan publiknya.

Tabel 4.  
Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Se Jawa Tengah Pengeluaran (dalam trilyun Rp), 2019-2020

Jenis Pengeluaran		Provinsi Jawa Tengah		Kab/Kota Se Jawa Tengah	
		2019	2020*)	2019	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Tidak Langsung	18,77	19,91	44,74	48,35
B.	Belanja Langsung	7,38	9,112	35,44	35,30
C.	Pembiayaan Daerah	1,34	0,08	6,55	1,05
<b>JUMLAH</b>		27,49	29,11	86,73	84,71

\*) Data APBD

Pada APBD 2020 jumlah pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar 84,71 trilyun rupiah turun jika dibandingkan realisasi APBD 2019 yang sebesar 86,73 trilyun rupiah. Jika memperhatikan komponen pendukungnya maka belanja tidak langsung meningkat 8,07 persen dari 44,74 trilyun rupiah meningkat menjadi 48,35. Sementara untuk belanja langsung dianggarkan sedikit menurun yaitu sebesar 0,39 persen dari 35,444 trilyun menjadi 35,30 trilyun. Komponen yang menyebabkan penurunan pengeluaran yang cukup signifikan terjadi pada Pembiayaan Daerah, dimana pada realisasi anggaran 2019 besarnya mencapai 6,55 trilyun rupiah sedangkan pada anggaran 2020 hanya sebesar 1,05 trilyun rupiah.

### 3.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja

Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Tidak Terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari sisi Belanja Tidak Langsung APBD 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa Belanja Pegawai paling besar menyerap pengeluaran daerah, yaitu sebesar 30,49 persen, namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 31,28 persen. Komponen terbesar setelah belanja pegawai pada APBD 2020 berturut-turut adalah Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Masing-masing kontribusi komponen tersebut terhadap total pengeluaran adalah 29,42 persen, 28,54 persen dan 11,20 persen. Jenis Belanja Tidak Langsung lainnya memberikan kontribusi kurang dari 1 persen. Pada Realisasi APBD 2019, komponen terbesar setelah Belanja Pegawai adalah Belanja Bagi Hasil sebesar 27,97 persen dan Belanja Hibah sebesar 27,47 persen.

Tabel 5.  
Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Menurut Komponen Penyusunnya (dalam trilyun Rp), 2019-2020

Jenis Pengeluaran		Provinsi Jawa Tengah		Kab/Kota Se Jawa Tengah	
		2019	2020*)	2019	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Pegawai	5,87	6,07	29,48	31,90
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,02	0,02
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,03
4.	Belanja Hibah	5,16	5,86	1,64	2,42
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,05	0,53	0,78
6.	Belanja Bagi Hasil	5,25	5,68	0,37	0,41
7.	Belanja Bantuan Keuangan	2,45	2,23	12,68	12,34
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0,00	0,02	0,02	0,45
<b>JUMLAH</b>		18,77	19,91	44,74	48,35

\*) Data APBD

Sementara dari sisi Belanja Tidak Langsung APBD 2020 Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa Belanja Pegawai paling besar menyerap pengeluaran daerah, yaitu sebesar 65,97 persen, atau mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 65,89 persen. Komponen terbesar setelah Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2019 berturut-turut adalah Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Hibah. Masing-masing kontribusi komponen tersebut terhadap total pengeluaran adalah 28,33 persen dan 3,68 persen, sementara itu jenis belanja tak langsung lainnya kurang dari 1 persen. Pada APBD 2020, setelah Belanja Pegawai komponen Belanja Tidak Langsung Lainnya adalah Belanja Bantuan Keuangan sebesar 25,52 persen dan Belanja Hibah sebesar 5,01 persen.

### **3.2.2. Belanja Langsung**

Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pada realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlihat bahwa Belanja Barang dan Jasa menyumbang peranan yang paling besar terhadap total Belanja Langsung Realisasi APBD 2019 yaitu sebesar 61,79 persen. Sumbangan Belanja Barang dan Jasa ini diperkirakan mengalami penurunan pada APBD 2020 menjadi 55,00 persen, meskipun secara nilai belanja barang dan jasa naik menjadi 5,01 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,56 triliun rupiah. Pada APBD 2020, setelah Belanja Barang dan Jasa kontribusi terbesar berturut-turut adalah Belanja Modal serta Belanja Pegawai masing-masing sebesar 33,00 persen dan 12,00 persen. Jika diperhatikan angka nominalnya, seluruh jenis belanja langsung mengalami kenaikan.



Tabel 6.  
Belanja Langsung Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah  
Menurut Komponen Penyusunnya (dalam trilyun Rp), 2019-2020

Jenis Pengeluaran	Provinsi Jawa Tengah		Kab/Kota Se Jawa Tengah	
	2019	2020*)	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai	0,72	1,09	3,02	3,44
2. Belanja Barang dan Jasa	4,56	5,01	19,01	20,13
3. Belanja Modal	2,10	3,01	13,41	11,73
<b>JUMLAH</b>	7,38	9,12	35,44	35,30

\*) Data APBD

Untuk Belanja Langsung, pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah komponen Belanja Barang dan Jasa juga merupakan penyumbang terbesar. Peranannya terhadap Belanja Langsung pada realisasi anggaran seluruh Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah 2019 mencapai 19,01 trilyun rupiah ( 53,63 persen), diikuti Belanja Modal dengan sumbangan mencapai 13,41 trilyun rupiah (37,85 persen). Untuk Belanja Pegawai memberikan andil 3,02 trilyun rupiah (8,51 persen). Demikian pula terjadi pada APBD 2020 dimana Belanja Barang dan Jasa memberikan porsi terbesar pada Belanja Langsung mencapai 20,13 trilyun rupiah (57,04 persen) diikuti Belanja Modal sebesar 11,73 trilyun rupiah (33,24 persen) dan Belanja Pegawai sebesar 3,43 trilyun rupiah (9,73 persen).

### 3.2.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada APBD 2020 diperkirakan mengalami penurunan, yaitu dari 1,34 triliun rupiah pada realisasi APBD 2019 menjadi 80 milyar rupiah. Demikian pula dengan kontribusi Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan akan menurun 4,87 persen menjadi 0,27 persen.

Untuk komponen Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah APBD 2020 diperkirakan mengalami penurunan, yaitu dari 6,55 triliun rupiah pada realisasi APBD 2019 menjadi 1,05 milyar rupiah. Kontribusi Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah diperkirakan akan menurun dari 7,55 persen pada realisasi APBD 2019 menjadi 1,24 persen pada APBD 2020.





*Realisasi*

# BELANJA LANGSUNG KAB/KOTA SE JAWA TENGAH

## 2018-2020\*

\* (APBD)



2019

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	24 702 318 191	25 859 780 138	28 301 075 368
1. Pendapatan Asli Daerah	13 711 836 038	14 437 914 236	15 993 530 006
1.1. Pajak Daerah	11 507 119 643	11 951 919 535	13 440 249 764
1.2. Retribusi Daerah	104 870 145	114 861 059	126 511 417
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	459 626 768	512 701 994	523 423 448
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	1 640 219 482	1 858 431 648	1 903 345 377
2. Dana Perimbangan	10 933 776 832	11 334 903 061	12 214 821 794
2.1. Bagi Hasil Pajak	760 737 570	564 290 384	764 710 178
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 712 351	11 677 938	12 114 444
2.3. Dana Alokasi Umum	3 652 586 431	3 784 512 513	3 830 691 947
2.4. Dana Alokasi Khusus	6 511 740 480	6 974 422 226	7 607 305 225
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	56 705 321	86 962 841	92 723 568
B. Pembiayaan Daerah	1 528 916 848	1 630 776 602	805 499 375
<b>Jumlah</b>	<b>26 231 235 039</b>	<b>27 490 556 740</b>	<b>29 106 574 743</b>

\*) Data APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 2  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	18 046 095 822	18 766 603 725	19 911 058 396
1. Belanja Pegawai	5 760 182 791	5 869 662 600	6 071 250 541
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	5 150 000 984	5 155 826 081	5 858 652 916
5. Belanja Bantuan Sosial	41 442 950	44 325 750	48 292 000
6. Belanja Bagi Hasil	4 971 230 607	5 248 472 302	5 682 574 986
7. Belanja Bantuan Keuangan	2 110 119 984	2 445 654 561	2 230 287 953
8. Pengeluaran Tidak Terduga	13 118 506	2 662 431	20 000 000
B. Belanja Langsung	6 432 536 735	7 384 459 117	9 115 516 347
1. Belanja Pegawai	708 078 472	722 240 541	1 093 683 575
2. Belanja Barang dan Jasa	4 042 705 957	4 562 499 451	5 013 826 732
3. Belanja Modal	1 681 752 306	2 099 719 125	3 008 006 040
C. Pembiayaan Daerah	1 752 602 482	1 339 493 898	80 000 000
<b>Jumlah</b>	<b>26 231 235 039</b>	<b>27 490 556 740</b>	<b>29 106 574 743</b>

\*) Data APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 3  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	75 502 654 859	80 180 604 152	80 077 174 218
1. Pendapatan Asli Daerah	13 000 699 554	14 227 603 030	14 396 872 282
1.1. Pajak Daerah	4 924 458 894	5 640 466 498	5 576 877 434
1.2. Retribusi Daerah	848 655 637	852 007 078	1 030 260 598
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	529 876 315	577 824 873	621 607 625
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	6 697 708 708	7 157 304 581	7 168 126 625
2. Dana Perimbangan	45 777 412 380	47 154 688 955	47 656 606 873
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 548 621 494	1 217 059 300	1 496 869 394
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	118 695 672	139 536 753	85 083 310
2.3. Dana Alokasi Umum	33 486 506 187	35 056 556 848	35 159 305 766
2.4. Dana Alokasi Khusus	10 623 589 027	10 741 536 054	10 915 348 403
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	16 724 542 925	18 798 312 167	18 023 695 063
B. Pembiayaan Daerah	7 640 039 182	6 547 481 859	4 631 107 210
Jumlah	83 142 694 041	86 728 086 011	84 708 281 428

\*) Data APBD Kabupaten/Kota



Lampiran 4  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	42 449 613 435	44 742 973 050	48 354 320 298
1. Belanja Pegawai	29 062 009 711	29 480 470 536	31 900 756 501
2. Belanja Bunga	15 622 418	21 845 039	16 559 632
3. Belanja Subsidi	1 408 592	1 511 666	33 433 110
4. Belanja Hibah	1 522 730 768	1 644 803 972	2 423 491 479
5. Belanja Bantuan Sosial	509 352 977	526 951 563	780 391 763
6. Belanja Bagi Hasil	349 906 933	370 934 118	407 186 119
7. Belanja Bantuan Keuangan	10 946 377 438	12 675 114 447	12 341 546 702
8. Pengeluaran Tidak Terduga	42 204 598	21 341 709	450 954 992
B. Belanja Langsung	33 707 836 653	35 439 149 881	35 299 859 020
1. Belanja Pegawai	2 807 206 775	3 017 189 665	3 434 546 887
2. Belanja Barang dan Jasa	16 890 755 106	19 007 094 116	20 133 377 965
3. Belanja Modal	14 009 874 772	13 414 866 100	11 731 934 168
C. Pembiayaan Daerah	6 985 243 953	6 545 963 080	1 054 102 110
Jumlah	83 142 694 041	86 728 086 011	84 708 281 428

\*) Data APBD Kabupaten/Kota

Lampiran 5  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	3 049 351 736	3 282 797 966	2 959 727 074
1. Pendapatan Asli Daerah	497 353 613	574 276 794	495 407 770
1.1. Pajak Daerah	167 335 000	209 475 849	162 821 000
1.2. Retribusi Daerah	44 164 197	44 740 276	18 750 776
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18 053 817	26 190 072	41 911 101
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	267 800 599	293 870 597	271 924 893
2. Dana Perimbangan	1 893 593 644	1 928 670 864	1 750 582 171
2.1. Bagi Hasil Pajak	70 533 064	60 515 822	58 500 412
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 780 195	1 158 788	8 005 720
2.3. Dana Alokasi Umum	1 362 443 518	1 423 200 397	1 295 279 562
2.4. Dana Alokasi Khusus	458 836 867	443 795 857	388 796 477
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	658 404 479	779 850 308	713 737 133
B. Pembiayaan Daerah	221 474 493	302 164 118	259 904 889
Jumlah	3 270 826 229	3 584 962 084	3 219 631 963

\*) Data APBD Kabupaten Cilacap

Lampiran 6  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 803 472 160	1 762 434 310	1 962 849 152
1. Belanja Pegawai	1 291 959 720	1 193 689 051	1 233 942 013
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	400 000	400 000	0
4. Belanja Hibah	43 843 363	58 596 950	34 384 384
5. Belanja Bantuan Sosial	12 437 418	5 884 050	94 667 828
6. Belanja Bagi Hasil	19 136 321	22 956 759	24 408 140
7. Belanja Bantuan Keuangan	428 316 894	480 907 500	458 864 752
8. Pengeluaran Tidak Terduga	7 378 444	0	116 582 035
B. Belanja Langsung	1 457 354 069	1 520 886 828	1 231 193 811
1. Belanja Pegawai	151 147 854	202 953 029	227 978 965
2. Belanja Barang dan Jasa	673 347 480	654 612 601	614 704 412
3. Belanja Modal	632 858 735	663 321 198	388 510 434
C. Pembiayaan Daerah	10 000 000	301 640 946	25 589 000
Jumlah	3 270 826 229	3 584 962 084	3 219 631 963

\*) Data APBD Kabupaten Cilacap

Lampiran 7  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	3 265 926 652	3 434 925 995	3 568 568 764
1. Pendapatan Asli Daerah	648 326 914	686 805 512	729 892 819
1.1. Pajak Daerah	211 550 292	229 377 286	275 500 000
1.2. Retribusi Daerah	32 451 215	32 644 362	31 982 177
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24 789 507	12 907 559	13 498 114
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	379 535 900	411 876 305	408 912 528
2. Dana Perimbangan	1 894 413 015	1 940 352 356	2 046 987 460
2.1. Bagi Hasil Pajak	41 388 138	27 188 634	40 796 641
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 520 017	1 467 574	1 346 485
2.3. Dana Alokasi Umum	1 373 971 809	1 437 036 239	1 461 114 316
2.4. Dana Alokasi Khusus	477 533 051	474 659 909	543 730 018
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	723 186 723	807 768 127	791 688 485
B. Pembiayaan Daerah	388 439 357	290 345 330	205 000 000
Jumlah	3 654 366 009	3 725 271 325	3 773 568 764

\*) Data APBD Kabupaten Banyumas

Lampiran 8  
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas  
Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 944 828 483	2 026 563 878	2 209 349 806
1. Belanja Pegawai	1 274 582 003	1 314 462 583	1 456 016 030
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	77 228 833	40 857 345	41 345 850
5. Belanja Bantuan Sosial	14 968 241	13 859 459	24 740 471
6. Belanja Bagi Hasil	19 309 876	25 041 355	30 748 218
7. Belanja Bantuan Keuangan	558 608 985	631 809 266	651 499 237
8. Pengeluaran Tidak Terduga	130 545	533 870	5 000 000
B. Belanja Langsung	1 374 232 276	1 430 986 323	1 534 568 958
1. Belanja Pegawai	22 450 727	21 832 812	29 680 816
2. Belanja Barang dan Jasa	826 364 609	930 356 014	1 007 543 935
3. Belanja Modal	525 416 940	478 797 497	497 344 207
C. Pembiayaan Daerah	335 305 250	267 721 124	29 650 000
Jumlah	3 654 366 009	3 725 271 325	3 773 568 764

\*) Data APBD Kabupaten Banyumas

Lampiran 9  
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 948 442 029	2 076 658 114	2 042 708 319
1. Pendapatan Asli Daerah	282 679 019	305 996 806	284 009 239
1.1. Pajak Daerah	57 568 783	62 233 744	55 995 000
1.2. Retribusi Daerah	44 243 733	14 721 766	13 381 574
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21 406 072	20 642 144	22 279 897
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	159 460 431	208 399 152	192 352 768
2. Dana Perimbangan	1 240 574 232	1 271 720 206	1 274 999 202
2.1. Bagi Hasil Pajak	24 063 527	19 449 562	24 468 092
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 370 725	1 332 045	1 104 858
2.3. Dana Alokasi Umum	881 574 483	918 228 685	934 782 107
2.4. Dana Alokasi Khusus	333 565 497	332 709 914	314 644 145
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	425 188 778	498 941 102	483 699 878
B. Pembiayaan Daerah	114 486 230	125 149 497	61 405 000
Jumlah	2 062 928 259	2 201 807 611	2 104 113 319

\*) Data APBD Kabupaten Purbalingga

Lampiran 10  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 252 309 402	1 181 395 993	1 281 187 859
1. Belanja Pegawai	872 243 222	765 871 030	794 513 894
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	500 000	986 500	500 000
4. Belanja Hibah	26 442 318	26 241 822	77 568 353
5. Belanja Bantuan Sosial	24 501 100	26 675 150	20 759 000
6. Belanja Bagi Hasil	6 645 949	6 645 949	6 937 738
7. Belanja Bantuan Keuangan	321 751 357	354 768 732	379 908 874
8. Pengeluaran Tidak Terduga	225 456	206 810	1 000 000
B. Belanja Langsung	672 599 031	881 331 857	814 625 460
1. Belanja Pegawai	0	51 999 922	57 335 521
2. Belanja Barang dan Jasa	402 071 402	567 195 154	515 949 380
3. Belanja Modal	270 527 629	262 136 781	241 340 559
C. Pembiayaan Daerah	138 019 826	139 079 761	8 300 000
Jumlah	2 062 928 259	2 201 807 611	2 104 113 319

\*) Data APBD Kabupaten Purbalingga

Lampiran 11  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 074 653 162	2 105 990 272	2 168 786 068
1. Pendapatan Asli Daerah	235 994 436	257 700 650	263 413 965
1.1. Pajak Daerah	57 741 373	60 732 283	60 653 500
1.2. Retribusi Daerah	30 582 362	21 457 326	21 808 395
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 038 004	17 091 096	18 006 150
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	132632697	158 419 945	162945920
2. Dana Perimbangan	1 354 080 375	1 345 282 274	1 396 270 326
2.1. Bagi Hasil Pajak	28 666 870	21 670 909	28 295 026
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 381 781	1 310 961	1 113 235
2.3. Dana Alokasi Umum	959 486 489	999 003 344	1 015 129 697
2.4. Dana Alokasi Khusus	364 545 235	323 297 060	351 732 368
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	484 578 351	503 007 348	509 101 777
B. Pembiayaan Daerah	172 299 944	116 951 143	91 092 336
Jumlah	2 246 953 106	2 222 941 415	2 259 878 404

\*) Data APBD Kabupaten Banjarnegara



Lampiran 12  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 208 390 751	1 269 563 421	1 317 389 035
1. Belanja Pegawai	812 106 333	814 306 718	857 260 193
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	38 078 085	44 958 598	37 599 000
5. Belanja Bantuan Sosial	22 248 880	18 265 651	16 450 000
6. Belanja Bagi Hasil	5 487 219	10 854 531	13 935 041
7. Belanja Bantuan Keuangan	330 198 444	379 364 226	386 144 801
8. Pengeluaran Tidak Terduga	271 790	1 813 697	6 000 000
B. Belanja Langsung	910 705 932	853 470 376	930 589 369
1. Belanja Pegawai	63 708 194	67 782 303	63 981 161
2. Belanja Barang dan Jasa	372 390 049	427 482 544	429 167 254
3. Belanja Modal	474 607 689	358 205 529	437 440 954
C. Pembiayaan Daerah	127 856 423	99 907 618	11 900 000
Jumlah	2 246 953 106	2 222 941 415	2 259 878 404

\*) Data APBD Kabupaten Banjarnegara

Lampiran 13  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 639 732 829	2 818 494 984	2 878 556 768
1. Pendapatan Asli Daerah	351 965 057	409 163 433	417 693 691
1.1. Pajak Daerah	96 775 593	110 614 569	110 640 014
1.2. Retribusi Daerah	37 339 859	27 141 727	33 639 811
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 734 495	14 210 376	13 030 679
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	208115110	257 196 761	260383187
2. Dana Perimbangan	1 654 135 304	1 688 387 156	1 748 404 196
2.1. Bagi Hasil Pajak	28 209 494	20 809 792	29 360 052
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 417 932	1 349 317	1 153 902
2.3. Dana Alokasi Umum	1 234 003 169	1 279 681 428	1 322 910 412
2.4. Dana Alokasi Khusus	390 504 709	386 546 619	394 979 830
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	633 632 468	720 944 395	712 458 881
B. Pembiayaan Daerah	225 675 495	203 192 379	165 500 000
Jumlah	2 865 408 324	3 021 687 363	3 044 056 768

\*) Data APBD Kabupaten Kebumen

Lampiran 14  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 676 515 529	1 707 700 082	1 888 463 325
1. Belanja Pegawai	1 094 190 721	1 092 633 852	1 163 648 534
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	30 763 259	31 299 036	86 827 718
5. Belanja Bantuan Sosial	45 356 182	20 742 420	29 467 249
6. Belanja Bagi Hasil	14 048 214	15 502 510	13 696 177
7. Belanja Bantuan Keuangan	492 152 153	547 521 693	593 823 647
8. Pengeluaran Tidak Terduga	5 000	571	1 000 000
B. Belanja Langsung	975 539 649	1 101 849 363	1 145 293 443
1. Belanja Pegawai	61 887 511	94 148 451	108 277 118
2. Belanja Barang dan Jasa	543 647 761	641 860 118	692 333 376
3. Belanja Modal	370 004 377	365 840 794	344 682 949
C. Pembiayaan Daerah	213 353 146	212 137 918	10 300 000
Jumlah	2 865 408 324	3 021 687 363	3 044 056 768

\*) Data APBD Kabupaten Kebumen

Lampiran 15  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 050 879 036	2 172 436 925	2 297 741 137
1. Pendapatan Asli Daerah	278 952 386	280 396 156	326 571 675
1.1. Pajak Daerah	55 449 342	77 648 793	71 714 759
1.2. Retribusi Daerah	12 976 909	14 850 252	17 371 529
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 215 508	13 686 363	10 541 555
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	200310627	174 210 748	226943832
2. Dana Perimbangan	1 264 233 475	1 292 431 347	1 372 723 717
2.1. Bagi Hasil Pajak	30 214 339	18 260 509	25 135 199
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 427 751	1 316 792	1 110 442
2.3. Dana Alokasi Umum	924 251 795	963 312 191	1 011 560 710
2.4. Dana Alokasi Khusus	308 339 590	309 541 855	334 917 366
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	507 693 175	599 609 422	598 445 745
B. Pembiayaan Daerah	204 795 805	110 292 511	185 546 783
Jumlah	2 255 674 841	2 282 729 436	2 483 287 920

\*) Data APBD Kabupaten Purworejo

Lampiran 16  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 381 319 390	1 380 684 011	1 553 266 231
1. Belanja Pegawai	888 594 247	819 962 960	866 282 881
2. Belanja Bunga	0	0	850 000
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	30 691 695	43 952 604	104 693 945
5. Belanja Bantuan Sosial	12 593 176	12 033 281	9 221 650
6. Belanja Bagi Hasil	10 897 423	8 136 061	8 776 780
7. Belanja Bantuan Keuangan	437 473 201	496 599 105	560 440 975
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 069 648	0	3 000 000
B. Belanja Langsung	874 355 451	805 605 215	930 021 689
1. Belanja Pegawai	84 120 186	71 747 613	51 428 652
2. Belanja Barang dan Jasa	413 210 306	406 443 901	511 175 026
3. Belanja Modal	377 024 969	327 413 701	367 418 011
C. Pembiayaan Daerah	0	96 440 210	0
Jumlah	2 255 674 841	2 282 729 436	2 483 287 920

\*) Data APBD Kabupaten Purworejo

Lampiran 17  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 851 441 024	1 958 595 025	1 935 748 156
1. Pendapatan Asli Daerah	226 819 478	238 371 743	224 697 827
1.1. Pajak Daerah	41 562 348	44 753 784	41 799 500
1.2. Retribusi Daerah	9 712 862	11 316 198	10 176 290
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 368 537	19 266 091	17 917 802
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	160175731	163 035 670	154804235
2. Dana Perimbangan	1 139 805 206	1 236 562 230	1 255 151 878
2.1. Bagi Hasil Pajak	20 295 506	14 542 154	32 440 301
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 331 067	14 907 366	1 155 812
2.3. Dana Alokasi Umum	827 791 657	877 474 203	889 213 906
2.4. Dana Alokasi Khusus	277 386 976	329 638 507	332 341 859
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	484 816 340	483 661 052	455 898 451
B. Pembiayaan Daerah	271 564 366	255 457 766	134 532 479
Jumlah	2 123 005 390	2 214 052 791	2 070 280 635

\*) Data APBD Kabupaten Wonosobo

Lampiran 18  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 002 446 630	1 060 751 562	1 190 655 302
1. Belanja Pegawai	693 912 697	706 706 959	746 311 465
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	15 806 635	22 946 477	78 609 822
5. Belanja Bantuan Sosial	7 065 500	14 381 400	12 583 900
6. Belanja Bagi Hasil	5 107 990	5 575 709	5 197 579
7. Belanja Bantuan Keuangan	275 594 848	306 529 296	342 952 536
8. Pengeluaran Tidak Terduga	4 958 960	4 611 721	5 000 000
B. Belanja Langsung	853 720 739	964 043 396	864 690 333
1. Belanja Pegawai	44 012 999	46 106 321	51 007 185
2. Belanja Barang dan Jasa	428 107 080	487 171 425	494 786 098
3. Belanja Modal	381 600 660	430 765 650	318 897 050
C. Pembiayaan Daerah	266 838 021	189 257 833	14 935 000
Jumlah	2 123 005 390	2 214 052 791	2 070 280 635

\*) Data APBD Kabupaten Wonosobo

Lampiran 19  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 302 190 544	2 575 439 826	2 621 169 424
1. Pendapatan Asli Daerah	325 089 093	417 178 100	406 095 299
1.1. Pajak Daerah	124 444 073	156 886 789	154 840 377
1.2. Retribusi Daerah	18 186 191	22 934 191	46 334 305
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28 534 359	23 700 418	27 548 500
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	153924470	213 656 702	177372117
2. Dana Perimbangan	1 398 132 842	1 452 804 059	1 519 525 012
2.1. Bagi Hasil Pajak	35 047 563	26 872 678	34 911 419
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 384 029	1 375 208	1 117 415
2.3. Dana Alokasi Umum	1 060 540 612	1 097 366 974	1 109 430 605
2.4. Dana Alokasi Khusus	301 160 638	327 189 199	374 065 573
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	578 968 609	705 457 667	695 549 113
B. Pembiayaan Daerah	432 441 999	222 184 975	98 031 254
Jumlah	2 734 632 543	2 797 624 801	2 719 200 678

\*) Data APBD Kabupaten Magelang



Lampiran 20  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 469 755 920	1 600 619 506	1 637 787 441
1. Belanja Pegawai	843 116 457	840 371 055	920 586 664
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	55 322 665	46 064 197	45 353 380
5. Belanja Bantuan Sosial	40 944 365	30 198 609	8 268 100
6. Belanja Bagi Hasil	15 546 920	18 900 059	21 899 049
7. Belanja Bantuan Keuangan	513 879 513	665 011 831	636 680 248
8. Pengeluaran Tidak Terduga	946 000	73 755	5 000 000
B. Belanja Langsung	1 016 784 641	967 974 097	1 075 709 237
1. Belanja Pegawai	82 077 962	77 570 825	104 885 467
2. Belanja Barang dan Jasa	432 979 304	503 873 277	597 044 160
3. Belanja Modal	501 727 375	386 529 995	373 779 610
C. Pembiayaan Daerah	248 091 982	229 031 198	5 704 000
Jumlah	2 734 632 543	2 797 624 801	2 719 200 678

\*) Data APBD Kabupaten Magelang

Lampiran 21  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 227 780 710	2 357 487 210	2 388 366 025
1. Pendapatan Asli Daerah	342 957 214	395 431 863	369 369 271
1.1. Pajak Daerah	134 430 549	149 666 539	133 211 748
1.2. Retribusi Daerah	16 089 869	21 088 975	15 329 346
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18 987 097	13 970 406	14 950 961
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	173449699	210 705 943	205877216
2. Dana Perimbangan	1 438 528 619	1 436 635 314	1 495 998 683
2.1. Bagi Hasil Pajak	41 487 198	36 177 414	39 864 068
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 413 096	1 414 242	1 193 235
2.3. Dana Alokasi Umum	1 014 602 020	1 045 669 923	1 064 047 626
2.4. Dana Alokasi Khusus	381 026 306	353 373 735	390 893 754
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	446 294 877	525 420 033	522 998 071
B. Pembiayaan Daerah	164 314 295	156 494 100	92 261 114
Jumlah	2 392 095 005	2 513 981 310	2 480 627 139

\*) Data APBD Kabupaten Boyolali

Lampiran 22  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 270 091 702	1 336 037 461	1 413 749 279
1. Belanja Pegawai	876 421 273	897 931 292	941 764 067
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	34 486 830	39 492 443	82 947 711
5. Belanja Bantuan Sosial	15 563 237	14 338 500	15 397 262
6. Belanja Bagi Hasil	14 953 727	11 021 121	14 854 110
7. Belanja Bantuan Keuangan	328 665 722	372 588 828	356 786 129
8. Pengeluaran Tidak Terduga	913	665 277	2 000 000
B. Belanja Langsung	933 021 060	1 045 564 404	1 052 694 144
1. Belanja Pegawai	64 021 493	57 114 483	60 404 755
2. Belanja Barang dan Jasa	370 027 483	457 856 077	488 214 607
3. Belanja Modal	498 972 084	530 593 844	504 074 782
C. Pembiayaan Daerah	188 982 243	132 379 445	14 183 716
Jumlah	2 392 095 005	2 513 981 310	2 480 627 139

\*) Data APBD Kabupaten Boyolali

Lampiran 23  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 545 432 179	2 689 353 250	2 721 807 486
1. Pendapatan Asli Daerah	373 770 434	311 648 401	304 546 856
1.1. Pajak Daerah	115 301 500	125 444 617	132 050 000
1.2. Retribusi Daerah	13 285 654	17 296 913	14 123 604
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16 800 999	12 988 398	18 285 884
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	228 382 281	155 918 473	140087368
2. Dana Perimbangan	1 662 130 955	1 666 073 635	1 707 736 367
2.1. Bagi Hasil Pajak	46 855 792	30 954 234	38 307 865
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 377 798	1 275 750	1 071 231
2.3. Dana Alokasi Umum	1 237 967 327	1 282 250 122	1 297 168 894
2.4. Dana Alokasi Khusus	375 930 038	351 593 529	371 188 377
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	509 530 790	711 631 214	709 524 263
B. Pembiayaan Daerah	455 685 506	395 412 482	185 519 812
Jumlah	3 001 117 685	3 084 765 732	2 907 327 298

\*) Data APBD Kabupaten Klaten

Lampiran 24  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 954 442 601	1 816 935 737	1 989 682 907
1. Belanja Pegawai	1 175 845 078	998 225 473	1 225 991 040
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	122 478	2 000 000
4. Belanja Hibah	55 105 525	49 234 334	96 824 937
5. Belanja Bantuan Sosial	2 387 700	4 891 750	6 118 500
6. Belanja Bagi Hasil	18 529 370	14 346 948	14 617 360
7. Belanja Bantuan Keuangan	697 771 928	750 114 754	641 131 070
8. Pengeluaran Tidak Terduga	4 803 000	0	3 000 000
B. Belanja Langsung	1 018 676 084	865 420 997	916 644 391
1. Belanja Pegawai	84 875 127	91 726 101	104 295 605
2. Belanja Barang dan Jasa	466 421 285	465 549 492	514 300 530
3. Belanja Modal	467 379 672	308 145 404	298 048 256
C. Pembiayaan Daerah	27 999 000	402 409 001	1 000 000
Jumlah	3 001 117 685	3 084 765 735	2 907 327 298

\*) Data APBD Kabupaten Klaten

Lampiran 25  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 055 517 964	2 143 687 570	2 039 440 679
1. Pendapatan Asli Daerah	433 485 481	458 742 224	332 207 075
1.1. Pajak Daerah	235 894 523	262 419 139	161 400 000
1.2. Retribusi Daerah	23 045 709	19 063 458	19 047 588
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20 894 425	22 647 819	26 400 013
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	153650824	154 611 808	125359474
2. Dana Perimbangan	1 219 811 099	1 241 762 237	1 287 500 168
2.1. Bagi Hasil Pajak	25 167 028	15 837 401	31 214 436
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 340 170	1 275 750	1 070 889
2.3. Dana Alokasi Umum	906 416 629	946 104 486	953 962 609
2.4. Dana Alokasi Khusus	286 887 272	278 544 600	301 252 234
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	402 221 384	443 183 109	419 733 436
B. Pembiayaan Daerah	467 281 226	0	362 089 283
Jumlah	2 522 799 190	2 143 687 570	2 401 529 962

\*) Data APBD Kabupaten Sukoharjo

Lampiran 26  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 175 739 592	1 227 182 518	1 329 449 200
1. Belanja Pegawai	816 026 582	840 974 792	919 879 536
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	33 963 567	29 017 219	71 076 645
5. Belanja Bantuan Sosial	16 245 000	19 074 000	16 015 000
6. Belanja Bagi Hasil	32 211 620	24 345 536	24 141 644
7. Belanja Bantuan Keuangan	277 109 988	313 656 819	289 484 375
8. Pengeluaran Tidak Terduga	182 835	114 152	8 852 000
B. Belanja Langsung	874 422 312	886 925 358	1 063 080 762
1. Belanja Pegawai	40 916 479	43 191 586	59 288 935
2. Belanja Barang dan Jasa	445 037 515	493 155 995	569 923 167
3. Belanja Modal	388 468 318	350 577 777	433 868 660
C. Pembiayaan Daerah	472 637 286	29 579 694	9 000 000
Jumlah	2 522 799 190	2 143 687 570	2 401 529 962

\*) Data APBD Kabupaten Sukoharjo

Lampiran 27  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 298 176 601	2 442 677 973	2 351 727 837
1. Pendapatan Asli Daerah	269 032 428	287 221 630	252 340 642
1.1. Pajak Daerah	54 709 784	60 298 882	53 537 000
1.2. Retribusi Daerah	23 668 124	24 242 063	25 891 784
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16 155 011	18 140 383	17 041 953
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	174499509	184 540 302	155869905
2. Dana Perimbangan	1 532 139 685	1 594 457 130	1 614 368 450
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 228 414	20 746 441	27 099 318
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 581 592	1 364 015	1 179 336
2.3. Dana Alokasi Umum	1 124 733 467	1 181 037 066	1 192 822 108
2.4. Dana Alokasi Khusus	379 596 212	391 309 608	393 267 688
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	497 004 488	560 999 213	485 018 745
B. Pembiayaan Daerah	197 663 101	243 265 473	126 182 425
Jumlah	2 495 839 702	2 685 943 446	2 477 910 262

\*) Data APBD Kabupaten Wonogiri



Lampiran 28  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 360 427 655	1 415 128 192	1 624 855 809
1. Belanja Pegawai	1 000 968 134	1 014 091 878	1 194 170 294
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	8 592	2 688	50 000
4. Belanja Hibah	15 134 708	17 715 853	58 822 222
5. Belanja Bantuan Sosial	11 941 150	9 864 200	11 920 000
6. Belanja Bagi Hasil	6 046 222	6 305 759	7 942 879
7. Belanja Bantuan Keuangan	325 930 644	366 972 842	350 950 414
8. Pengeluaran Tidak Terduga	398 205	174 972	1 000 000
B. Belanja Langsung	886 433 594	1 040 847 128	850 054 453
1. Belanja Pegawai	140 156 809	147 311 659	162 602 497
2. Belanja Barang dan Jasa	339 377 133	328 443 490	401 280 311
3. Belanja Modal	406 899 652	565 091 979	286 171 645
C. Pembiayaan Daerah	248 978 453	229 968 126	3 000 000
Jumlah	2 495 839 702	2 685 943 446	2 477 910 262

\*) Data APBD Kabupaten Wonogiri

Lampiran 29  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 113 929 232	2 179 409 707	2 225 308 095
1. Pendapatan Asli Daerah	343 156 469	387 763 013	357 146 402
1.1. Pajak Daerah	167 176 622	185 331 600	169 700 000
1.2. Retribusi Daerah	20 521 607	10 952 824	12 837 216
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 026 583	15 278 078	13 184 344
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	141431657	176 200 511	161424842
2. Dana Perimbangan	1 325 732 298	1 358 762 558	1 398 560 239
2.1. Bagi Hasil Pajak	37 190 832	27 910 631	34 211 127
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 690 896	1 644 291	1 206 327
2.3. Dana Alokasi Umum	978 664 650	1 018 544 740	1 027 021 995
2.4. Dana Alokasi Khusus	308 185 920	310 662 896	336 120 790
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	445 040 465	432 884 136	469 601 454
B. Pembiayaan Daerah	187 137 757	290 053 216	121 128 650
Jumlah	2 301 066 989	2 469 462 923	2 346 436 745

\*) Data APBD Kabupaten Karanganyar

Lampiran 30  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 293 530 204	1 382 925 710	1 451 728 591
1. Belanja Pegawai	880 448 147	947 080 010	1 021 551 870
2. Belanja Bunga	0	0	5 000 000
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	86 881 514	63 649 583	61 549 000
5. Belanja Bantuan Sosial	4 748 800	13 455 000	16 842 000
6. Belanja Bagi Hasil	17 419 192	17 923 459	18 254 330
7. Belanja Bantuan Keuangan	303 448 658	340 202 487	326 031 391
8. Pengeluaran Tidak Terduga	583 893	615 171	2 500 000
B. Belanja Langsung	771 051 354	879 090 259	835 508 154
1. Belanja Pegawai	30 142 180	6 438 315	8 787 530
2. Belanja Barang dan Jasa	478 973 150	585 767 169	618 798 319
3. Belanja Modal	261 936 024	286 884 775	207 922 305
C. Pembiayaan Daerah	236 485 431	207 446 954	59 200 000
Jumlah	2 301 066 989	2 469 462 923	2 346 436 745

\*) Data APBD Kabupaten Karanganyar

Lampiran 31  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 176 997 512	2 300 826 070	2 194 236 967
1. Pendapatan Asli Daerah	334 303 284	368 325 800	338 220 314
1.1. Pajak Daerah	85 863 439	99 967 537	89 625 000
1.2. Retribusi Daerah	13 282 290	14 003 792	16 296 399
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 420 486	18 993 728	17 742 634
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	220737069	235 360 743	214556281
2. Dana Perimbangan	1 405 508 763	1 489 466 586	1 498 069 440
2.1. Bagi Hasil Pajak	19 056 875	12 315 899	19 357 184
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 371 869	8 724 440	8 549 676
2.3. Dana Alokasi Umum	1 049 016 918	1 083 308 681	1 105 770 343
2.4. Dana Alokasi Khusus	329 063 101	385 117 566	364 392 237
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	437 185 465	443 033 684	357 947 213
B. Pembiayaan Daerah	359 006 818	277 929 112	228 649 926
Jumlah	2 536 004 330	2 578 755 182	2 422 886 893

\*) Data APBD Kabupaten Sragen

Lampiran 32  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 323 969 993	1 338 302 483	1 465 590 837
1. Belanja Pegawai	887 672 613	882 903 955	1 010 328 089
2. Belanja Bunga	1 599 944	11 807 951	3 800 000
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	57 262 561	48 993 049	83 768 251
5. Belanja Bantuan Sosial	14 099 300	26 921 730	9 720 500
6. Belanja Bagi Hasil	7 617 749	9 217 906	9 520 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	<b>355 139 706</b>	358 446 892	345 433 997
8. Pengeluaran Tidak Terduga	578 120	11 000	3 020 000
B. Belanja Langsung	912 832 764	753 837 801	847 296 056
1. Belanja Pegawai	90 768 720	81 206 478	79 276 033
2. Belanja Barang dan Jasa	393 845 191	423 304 937	437 535 774
3. Belanja Modal	428 218 853	249 326 386	330 484 249
C. Pembiayaan Daerah	299 201 573	486 614 898	110 000 000
Jumlah	2 536 004 330	2 578 755 182	2 422 886 893

\*) Data APBD Kabupaten Sragen

Lampiran 33  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 439 501 262	2 581 437 573	2 612 712 161
1. Pendapatan Asli Daerah	315 743 176	344 559 032	332 001 228
1.1. Pajak Daerah	77 019 507	95 732 253	79 967 500
1.2. Retribusi Daerah	12 766 570	15 508 782	13 986 870
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 556 370	22 077 682	15 602 558
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	208400729	211 240 315	222444300
2. Dana Perimbangan	1 520 822 496	1 563 813 943	1 662 550 064
2.1. Bagi Hasil Pajak	29 550 114	22 778 542	30 717 707
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11 410 586	11 667 971	11 856 552
2.3. Dana Alokasi Umum	1 094 460 434	1 144 560 870	1 215 026 908
2.4. Dana Alokasi Khusus	385 401 362	384 806 560	404 948 897
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	602 935 590	673 064 598	618 160 869
B. Pembiayaan Daerah	136 123 306	165 056 362	67 933 362
Jumlah	2 575 624 568	2 746 493 935	2 680 645 523

\*) Data APBD Kabupaten Grobogan

Lampiran 34  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 307 650 431	1 400 896 286	1 536 973 997
1. Belanja Pegawai	861 568 377	911 923 108	964 990 504
2. Belanja Bunga	11 559 670	7 290 095	3 500 000
3. Belanja Subsidi	500 000	0	649 025
4. Belanja Hibah	37 912 329	45 669 056	100 380 271
5. Belanja Bantuan Sosial	19 305 985	15 905 795	29 905 417
6. Belanja Bagi Hasil	7 886 297	9 500 414	9 395 437
7. Belanja Bantuan Keuangan	368 917 773	410 607 818	422 565 484
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0	5 587 859
B. Belanja Langsung	1 037 886 616	1 150 330 424	1 078 111 526
1. Belanja Pegawai	86 210 128	88 797 855	99 073 283
2. Belanja Barang dan Jasa	528 251 099	612 866 468	612 043 154
3. Belanja Modal	423 425 389	448 666 101	366 995 089
C. Pembiayaan Daerah	230 087 521	195 267 195	65 560 000
Jumlah	2 575 624 568	2 746 493 905	2 680 645 523

\*) Data APBD Kabupaten Grobogan

Lampiran 35  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 120 654 753	2 258 459 112	1 958 209 408
1. Pendapatan Asli Daerah	203 166 113	264 338 953	236 965 596
1.1. Pajak Daerah	53 816 735	61 320 813	47 150 400
1.2. Retribusi Daerah	8 638 972	9 267 268	7 045 355
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 112 978	13 805 331	53 217 424
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	132597428	179 945 541	129552417
2. Dana Perimbangan	1 375 550 409	1 441 729 666	1 251 008 099
2.1. Bagi Hasil Pajak	98 847 734	81 955 083	81 244 860
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 015 980	37 892 211	10 715 553
2.3. Dana Alokasi Umum	926 682 649	966 573 992	883 338 891
2.4. Dana Alokasi Khusus	333 004 046	355 308 380	275 708 795
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	541 938 231	552 390 493	470 235 713
B. Pembiayaan Daerah	63 608 031	63 923 454	54 602 894
Jumlah	2 184 262 784	2 322 382 566	2 012 812 302

\*) Data APBD Kabupaten Blora



Lampiran 36  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 196 108 652	1 266 740 791	1 337 446 503
1. Belanja Pegawai	792 631 624	805 076 175	798 320 959
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	35 541 525	42 362 840	63 976 610
5. Belanja Bantuan Sosial	1 436 500	0	1 296 000
6. Belanja Bagi Hasil	5 788 000	5 941 900	5 431 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	360 711 003	413 359 876	383 006 744
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0	85 415 190
B. Belanja Langsung	920 366 909	974 472 358	675 365 799
1. Belanja Pegawai	114 782 921	121 249 316	113 405 356
2. Belanja Barang dan Jasa	306 144 209	385 149 133	317 547 651
3. Belanja Modal	499 439 779	468 073 909	244 412 792
C. Pembiayaan Daerah	67 787 223	81 169 417	0
Jumlah	2 184 262 784	2 322 382 566	2 012 812 302

\*) Data APBD Kabupaten Blora

Lampiran 37  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 794 911 075	1 821 899 884	1 891 753 254
1. Pendapatan Asli Daerah	305 676 436	308 445 489	307 258 622
1.1. Pajak Daerah	100 438 353	100 695 232	100 522 250
1.2. Retribusi Daerah	21 441 590	19 034 000	23 051 081
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18 775 303	10 840 311	10 840 309
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	165021190	177 875 946	172844982
2. Dana Perimbangan	1 071 215 247	1 051 964 946	1 118 646 021
2.1. Bagi Hasil Pajak	38 804 729	37 178 857	43 942 090
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 206 959	1 600 291	0
2.3. Dana Alokasi Umum	771 584 367	799 760 392	810 570 557
2.4. Dana Alokasi Khusus	258 619 192	213 425 406	264 133 374
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	418 019 392	461 489 449	465 848 611
B. Pembiayaan Daerah	117 161 445	153 281 669	162 548 944
Jumlah	1 912 072 520	1 975 181 553	2 054 302 198

\*) Data APBD Kabupaten Rembang

Lampiran 38  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 064 012 362	1 122 949 019	1 217 401 111
1. Belanja Pegawai	648 104 051	662 778 873	698 334 579
2. Belanja Bunga	1 468 870	1 964 064	1 631 632
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	55 764 388	50 515 065	117 281 629
5. Belanja Bantuan Sosial	8 333 700	8 093 600	9 281 020
6. Belanja Bagi Hasil	10 765 820	11 944 475	12 357 333
7. Belanja Bantuan Keuangan	339 575 533	387 652 942	377 514 918
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0	1 000 000
B. Belanja Langsung	750 650 510	740 553 809	747 032 719
1. Belanja Pegawai	177 564 307	203 077 018	202 820 516
2. Belanja Barang dan Jasa	263 637 697	330 405 362	288 928 860
3. Belanja Modal	309 448 506	207 071 429	255 283 343
C. Pembiayaan Daerah	97 409 648	111 678 725	89 868 368
Jumlah	1 912 072 520	1 975 181 553	2 054 302 198

\*) Data APBD Kabupaten Rembang

Lampiran 39  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 750 282 961	2 838 881 396	2 786 249 672
1. Pendapatan Asli Daerah	383 912 843	363 997 154	351 859 894
1.1. Pajak Daerah	82 553 070	93 020 250	81 895 000
1.2. Retribusi Daerah	19 690 529	22 753 280	20 140 822
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16 232 546	19 067 729	17 441 032
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	265436698	229 155 895	232383040
2. Dana Perimbangan	1 637 310 968	1 637 460 890	1 684 334 678
2.1. Bagi Hasil Pajak	31 768 284	23 494 795	31 893 211
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 683 829	1 399 937	1 364 752
2.3. Dana Alokasi Umum	1 189 796 870	1 240 426 636	1 254 698 193
2.4. Dana Alokasi Khusus	414 061 985	372 139 522	396 378 522
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	729 059 150	837 423 352	750 055 100
B. Pembiayaan Daerah	284 081 305	252 593 286	123 971 000
Jumlah	3 034 364 266	3 091 474 682	2 910 220 672

\*) Data APBD Kabupaten Pati

Lampiran 40  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 729 057 545	1 790 846 018	1 858 943 528
1. Belanja Pegawai	1 009 513 539	1 026 883 158	1 129 380 414
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	44 362 678	41 314 100	48 057 119
5. Belanja Bantuan Sosial	12 251 165	8 981 500	13 379 500
6. Belanja Bagi Hasil	9 316 057	10 262 144	11 500 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	653 614 106	703 389 436	656 626 495
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	15 680	0
B. Belanja Langsung	996 835 853	1 079 414 385	1 041 277 144
1. Belanja Pegawai	38 446 625	25 611 000	17 579 793
2. Belanja Barang dan Jasa	535 337 132	648 703 087	718 661 477
3. Belanja Modal	423 052 096	405 100 298	305 035 874
C. Pembiayaan Daerah	308 470 868	221 214 279	10 000 000
Jumlah	3 034 364 266	3 091 474 682	2 910 220 672

\*) Data APBD Kabupaten Pati

Lampiran 41  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 996 530 094	2 090 430 364	1 810 667 069
1. Pendapatan Asli Daerah	337 364 609	343 824 123	378 701 780
1.1. Pajak Daerah	114 155 439	125 762 588	133 425 751
1.2. Retribusi Daerah	18 367 332	20 058 448	37 497 715
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 574 357	9 277 167	9 277 165
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	197267481	188 725 920	198501149
2. Dana Perimbangan	1 281 771 375	1 298 060 004	1 062 970 530
2.1. Bagi Hasil Pajak	234 319 737	208 249 295	212 481 666
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 340 380	1 275 870	1 078 436
2.3. Dana Alokasi Umum	807 056 991	851 036 584	849 410 428
2.4. Dana Alokasi Khusus	239 054 267	237 498 255	0
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	377 394 110	448 546 237	368 994 759
B. Pembiayaan Daerah	138 850 753	169 651 141	100 804 395
Jumlah	2 135 380 847	2 260 081 505	1 911 471 464

\*) Data APBD Kabupaten Kudus

Lampiran 42  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 083 987 574	1 256 975 332	1 070 039 366
1. Belanja Pegawai	783 615 107	804 796 655	751 757 086
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	54 557 133	180 493 535	34 138 634
5. Belanja Bantuan Sosial	7 221 230	14 444 930	8 818 016
6. Belanja Bagi Hasil	12 829 397	14 490 806	17 092 348
7. Belanja Bantuan Keuangan	225 764 707	242 749 406	256 233 282
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	873 714 078	804 688 825	841 432 098
1. Belanja Pegawai	42 286 521	44 435 059	150 379 108
2. Belanja Barang dan Jasa	453 849 265	482 043 187	393 449 662
3. Belanja Modal	377 578 292	278 210 579	297 603 328
C. Pembiayaan Daerah	177 679 195	198 417 348	0
Jumlah	2 135 380 847	2 260 081 505	1 911 471 464

\*) Data APBD Kabupaten Kudus

Lampiran 43  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 255 843 022	2 413 822 790	2 275 615 311
1. Pendapatan Asli Daerah	369 330 455	384 979 093	386 441 887
1.1. Pajak Daerah	104 945 233	127 423 770	122 584 604
1.2. Retribusi Daerah	21 352 298	21 487 228	17 108 183
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 178 943	13 370 152	13 414 748
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	232853981	222 697 943	233334352
2. Dana Perimbangan	1 339 634 293	1 393 154 749	1 269 902 959
2.1. Bagi Hasil Pajak	32 112 527	32 354 623	43 955 607
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 724 369	1 342 862	2 287 626
2.3. Dana Alokasi Umum	984 914 974	1 039 864 085	948 599 557
2.4. Dana Alokasi Khusus	314 882 423	319 593 179	275 060 169
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	546 878 274	635 688 948	619 270 465
B. Pembiayaan Daerah	166 987 611	114 559 912	123 446 700
Jumlah	2 422 830 633	2 528 382 702	2 399 062 011

\*) Data APBD Kabupaten Jepara



Lampiran 44  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 237 785 667	1 350 321 542	1 183 111 629
1. Belanja Pegawai	816 319 754	840 167 904	887 211 817
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	30 234 085
4. Belanja Hibah	51 616 300	59 512 356	52 356 400
5. Belanja Bantuan Sosial	22 900 380	38 059 049	212 091 650
6. Belanja Bagi Hasil	12 172 953	13 649 368	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	334 760 440	398 931 605	1 217 677
8. Pengeluaran Tidak Terduga	15 840	1 260	0
B. Belanja Langsung	1 062 788 455	987 181 747	852 519 841
1. Belanja Pegawai	32 751 777	36 469 989	92 800 275
2. Belanja Barang dan Jasa	632 253 636	625 472 536	523 904 705
3. Belanja Modal	397 783 042	325 239 222	235 814 861
C. Pembiayaan Daerah	122 256 511	190 879 413	363 430 541
Jumlah	2 422 830 633	2 528 382 702	2 399 062 011

\*) Data APBD Kabupaten Jepara

Lampiran 45  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 143 306 259	2 362 116 249	2 302 405 766
1. Pendapatan Asli Daerah	342 324 870	407 400 541	404 373 956
1.1. Pajak Daerah	138 652 749	156 474 532	146 235 340
1.2. Retribusi Daerah	24 905 213	42 537 037	24 235 118
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 612 165	18 246 788	18 525 813
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	161154743	190 142 184	215377685
2. Dana Perimbangan	1 205 186 811	1 274 117 336	1 309 475 841
2.1. Bagi Hasil Pajak	21 641 358	15 371 996	36 006 645
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 820 186	16 919 549	1 074 019
2.3. Dana Alokasi Umum	894 376 873	946 467 336	960 411 394
2.4. Dana Alokasi Khusus	275 348 404	295 358 455	311 983 783
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	595 794 578	680 598 372	588 555 969
B. Pembiayaan Daerah	124 565 321	200 338 526	98 000 000
Jumlah	2 267 871 580	2 562 454 775	2 400 405 766

\*) Data APBD Kabupaten Demak

Lampiran 46  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 112 479 534	1 237 752 567	1 403 456 638
1. Belanja Pegawai	722 431 041	736 325 682	840 675 654
2. Belanja Bunga	33 454	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	36 408 186	79 655 705	79 213 199
5. Belanja Bantuan Sosial	5 913 800	11 444 020	31 189 800
6. Belanja Bagi Hasil	14 637 559	16 053 219	18 072 508
7. Belanja Bantuan Keuangan	333 039 258	394 273 941	432 305 477
8. Pengeluaran Tidak Terduga	16 236	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	937 586 420	1 072 062 984	980 949 128
1. Belanja Pegawai	124 792 720	142 020 235	181 134 565
2. Belanja Barang dan Jasa	398 112 378	474 560 319	555 650 830
3. Belanja Modal	414 681 322	455 482 430	244 163 733
C. Pembiayaan Daerah	217 805 626	252 539 224	16 000 000
Jumlah	2 267 871 580	2 562 354 775	2 400 405 766

\*) Data APBD Kabupaten Demak

Lampiran 47  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 117 416 567	2 311 149 344	2 362 080 875
1. Pendapatan Asli Daerah	383 475 678	429 011 081	479 870 281
1.1. Pajak Daerah	152 256 801	174 542 552	203 502 238
1.2. Retribusi Daerah	31 931 213	34 461 264	43 566 829
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 873 896	11 193 933	11 620 464
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	189413768	208 813 332	221180750
2. Dana Perimbangan	1 307 508 473	1 351 090 468	1 394 524 062
2.1. Bagi Hasil Pajak	38 914 342	30 269 026	37 214 938
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 535 145	1 971 094	1 568 541
2.3. Dana Alokasi Umum	952 362 147	1 001 565 375	1 010 270 390
2.4. Dana Alokasi Khusus	314 696 839	317 284 973	345 470 193
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	426 432 416	531 047 795	487 686 532
B. Pembiayaan Daerah	240 489 394	181 106 149	94 925 319
Jumlah	2 357 905 961	2 492 255 493	2 457 006 194

\*) Data APBD Kabupaten Semarang

Lampiran 48  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 192 065 625	1 249 106 620	1 392 833 728
1. Belanja Pegawai	832 032 782	870 330 530	935 451 678
2. Belanja Bunga	0	392 115	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	49 481 435	37 281 877	103 934 626
5. Belanja Bantuan Sosial	16 577 100	15 403 983	17 303 715
6. Belanja Bagi Hasil	18 680 432	21 468 830	26 901 445
7. Belanja Bantuan Keuangan	272 763 829	303 370 630	307 242 264
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 530 047	858 655	2 000 000
B. Belanja Langsung	979 734 186	1 063 135 497	1 061 389 453
1. Belanja Pegawai	61 149 909	100 582 127	123 620 616
2. Belanja Barang dan Jasa	513 532 835	569 081 274	639 633 650
3. Belanja Modal	405 051 442	393 472 096	298 135 187
C. Pembiayaan Daerah	186 106 150	180 013 376	2 783 013
Jumlah	2 357 905 961	2 492 255 493	2 457 006 194

\*) Data APBD Kabupaten Semarang

Lampiran 49  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 731 235 867	1 878 383 823	1 921 489 275
1. Pendapatan Asli Daerah	252 020 935	278 313 775	266 913 818
1.1. Pajak Daerah	40 401 375	53 424 095	48 230 000
1.2. Retribusi Daerah	12 702 535	16 188 999	12 184 154
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24 857 474	14 571 585	15 598 461
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	174058551	194 129 096	190901203
2. Dana Perimbangan	1 069 110 356	1 133 246 263	1 185 543 845
2.1. Bagi Hasil Pajak	48 686 790	43 798 274	50 900 100
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 389 078	1 415 483	1 109 861
2.3. Dana Alokasi Umum	793 485 677	828 948 502	854 160 529
2.4. Dana Alokasi Khusus	225 548 811	259 084 004	279 373 355
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	410 105 576	466 823 785	469 031 612
B. Pembiayaan Daerah	87 224 723	91 129 078	75 000 000
Jumlah	1 818 460 590	1 969 512 901	1 996 489 275

\*) Data APBD Kabupaten Temanggung

Lampiran 50  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 064 943 026	1 138 907 143	1 243 781 080
1. Belanja Pegawai	648 743 167	676 939 398	730 249 646
2. Belanja Bunga	727 484	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	64 113 369	58 690 565	69 022 088
5. Belanja Bantuan Sosial	8 741 555	22 228 165	28 829 520
6. Belanja Bagi Hasil	4 972 398	5 259 574	6 410 600
7. Belanja Bantuan Keuangan	337 484 253	375 789 441	408 769 226
8. Pengeluaran Tidak Terduga	160 800	0	500 000
B. Belanja Langsung	605 366 260	702 126 497	737 708 195
1. Belanja Pegawai	80 088 354	101 536 317	130 555 823
2. Belanja Barang dan Jasa	339 506 112	377 340 993	423 937 599
3. Belanja Modal	185 771 794	223 249 187	183 214 773
C. Pembiayaan Daerah	148 151 304	128 479 261	15 000 000
Jumlah	1 818 460 590	1 969 512 901	1 996 489 275

\*) Data APBD Kabupaten Temanggung

Lampiran 51  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 138 513 509	2 228 384 400	2 337 475 683
1. Pendapatan Asli Daerah	335 842 483	350 500 850	425 302 414
1.1. Pajak Daerah	119 981 744	127 831 338	169 698 650
1.2. Retribusi Daerah	32 838 370	23 919 716	21 583 575
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 914 701	20 050 322	20 345 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	165107668	178 699 474	213675189
2. Dana Perimbangan	1 299 802 799	1 348 372 348	1 381 091 578
2.1. Bagi Hasil Pajak	45 888 096	39 485 521	42 753 144
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 640 894	1 591 346	1 502 656
2.3. Dana Alokasi Umum	956 331 079	998 236 127	1 006 102 383
2.4. Dana Alokasi Khusus	295 942 730	309 059 354	330 733 395
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	502 868 227	529 511 202	531 081 691
B. Pembiayaan Daerah	234 877 915	212 488 849	114 358 831
Jumlah	2 373 391 424	2 440 873 249	2 451 834 514

\*) Data APBD Kabupaten Kendal



Lampiran 52  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 261 618 268	1 344 605 707	1 557 905 845
1. Belanja Pegawai	875 649 933	914 377 153	1 046 754 771
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	37 536 295	50 298 345	101 880 236
5. Belanja Bantuan Sosial	4 515 000	3 150 000	0
6. Belanja Bagi Hasil	16 596 349	21 038 518	19 539 440
7. Belanja Bantuan Keuangan	325 700 359	353 336 530	386 231 398
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 620 332	2 405 161	3 500 000
B. Belanja Langsung	886 831 772	987 077 327	890 928 669
1. Belanja Pegawai	54 896 953	70 567 343	95 455 930
2. Belanja Barang dan Jasa	546 943 398	633 006 309	521 900 955
3. Belanja Modal	284 991 421	283 503 675	273 571 784
C. Pembiayaan Daerah	224 941 384	109 190 215	3 000 000
Jumlah	2 373 391 424	2 440 873 249	2 451 834 514

\*) Data APBD Kabupaten Kendal

Lampiran 53  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 701 877 299	1 769 958 202	1 840 617 426
1. Pendapatan Asli Daerah	237 547 973	245 836 087	246 398 163
1.1. Pajak Daerah	74 195 502	82 565 685	79 975 000
1.2. Retribusi Daerah	18 429 476	16 743 634	18 566 494
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 541 372	14 140 556	11 153 980
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	135381623	132 386 212	136702689
2. Dana Perimbangan	1 048 707 119	1 090 972 264	1 142 714 564
2.1. Bagi Hasil Pajak	34 648 925	23 081 031	38 215 686
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 550 297	8 631 022	2 614 094
2.3. Dana Alokasi Umum	781 383 387	817 365 659	835 669 833
2.4. Dana Alokasi Khusus	231 124 510	241 894 552	266 214 951
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	415 622 207	433 149 851	451 504 699
B. Pembiayaan Daerah	97 602 831	149 307 636	85 000 000
Jumlah	1 799 480 130	1 919 265 838	1 925 617 426

\*) Data APBD Kabupaten Batang

Lampiran 54  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 023 240 676	1 083 124 219	1 163 336 381
1. Belanja Pegawai	638 098 456	660 000 373	738 806 642
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	57 936 485	57 882 626	71 380 315
5. Belanja Bantuan Sosial	35 655 030	40 416 710	30 019 350
6. Belanja Bagi Hasil	6 950 836	8 426 281	9 262 497
7. Belanja Bantuan Keuangan	284 599 869	316 398 229	311 867 577
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	663 975 050	671 942 342	727 281 045
1. Belanja Pegawai	97 716 037	95 037 644	83 314 929
2. Belanja Barang dan Jasa	402 866 433	365 126 458	434 123 309
3. Belanja Modal	163 392 580	211 778 240	209 842 807
C. Pembiayaan Daerah	112 264 404	164 199 277	35 000 000
Jumlah	1 799 480 130	1 919 265 838	1 925 617 426

\*) Data APBD Kabupaten Batang

Lampiran 55  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 101 449 302	2 182 770 952	2 318 988 833
1. Pendapatan Asli Daerah	311 288 144	341 344 415	466 818 350
1.1. Pajak Daerah	65 416 345	78 217 365	90 091 442
1.2. Retribusi Daerah	10 166 247	12 809 087	27 289 085
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 354 576	17 331 867	13 231 475
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	228350976	232 986 096	336206348
2. Dana Perimbangan	1 288 217 218	1 321 954 447	1 346 752 233
2.1. Bagi Hasil Pajak	24 810 199	20 194 541	25 566 050
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 412 197	1 339 142	1 138 725
2.3. Dana Alokasi Umum	915 154 037	974 248 885	979 933 360
2.4. Dana Alokasi Khusus	346 840 785	326 171 879	340 114 098
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	501 943 940	519 472 090	505 418 250
B. Pembiayaan Daerah	230 152 103	170 620 432	127 667 309
Jumlah	2 331 601 405	2 353 391 384	2 446 656 142

\*) Data APBD Kabupaten Pekalongan

Lampiran 56  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 168 840 041	1 261 667 000	1 356 458 634
1. Belanja Pegawai	778 188 653	816 520 406	852 074 395
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	27 168 517	31 513 710	80 020 379
5. Belanja Bantuan Sosial	19 700 050	17 162 650	15 939 939
6. Belanja Bagi Hasil	6 605 825	7 465 203	10 690 714
7. Belanja Bantuan Keuangan	335 099 133	384 469 389	394 733 207
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 077 863	4 535 642	3 000 000
B. Belanja Langsung	991 904 389	921 867 790	1 090 197 508
1. Belanja Pegawai	160 110 163	169 718 520	183 751 866
2. Belanja Barang dan Jasa	400 381 256	406 983 972	489 121 314
3. Belanja Modal	431 412 970	345 165 298	417 324 328
C. Pembiayaan Daerah	170 856 975	169 856 594	0
<b>Jumlah</b>	<b>2 331 601 405</b>	<b>2 353 391 384</b>	<b>2 446 656 142</b>

\*) Data APBD Kabupaten Pekalongan

Lampiran 57  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 428 263 886	2 636 036 844	2 581 626 461
1. Pendapatan Asli Daerah	300 481 887	350 559 140	309 060 518
1.1. Pajak Daerah	76 107 420	87 622 429	79 300 000
1.2. Retribusi Daerah	29 878 293	39 652 662	35 015 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 475 375	20 220 506	23 680 518
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	179020799	203 063 543	171065000
2. Dana Perimbangan	1 542 918 674	1 598 475 375	1 626 617 797
2.1. Bagi Hasil Pajak	28 384 769	22 868 521	21 476 412
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 931 442	1 725 685	1 635 836
2.3. Dana Alokasi Umum	1 180 834 332	1 223 060 205	1 241 959 529
2.4. Dana Alokasi Khusus	331 768 131	350 820 964	361 546 020
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	584 863 325	687 002 329	645 948 146
B. Pembiayaan Daerah	230 602 905	312 404 993	255 216 424
Jumlah	2 658 866 791	2 948 441 837	2 836 842 885

\*) Data APBD Kabupaten Pemalang

Lampiran 58  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 386 950 161	1 502 335 764	1 668 205 883
1. Belanja Pegawai	929 536 880	959 359 914	1 043 138 414
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	27 141 800	55 674 250	115 786 700
5. Belanja Bantuan Sosial	5 030 150	3 513 000	4 342 500
6. Belanja Bagi Hasil	9 265 660	9 846 766	11 431 500
7. Belanja Bantuan Keuangan	414 695 184	472 579 334	491 506 769
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 280 487	1 362 500	2 000 000
B. Belanja Langsung	937 338 637	1 082 135 106	1 160 637 002
1. Belanja Pegawai	145 864 055	150 613 031	134 796 560
2. Belanja Barang dan Jasa	500 092 645	583 864 222	588 298 517
3. Belanja Modal	291 381 937	347 657 853	437 541 925
C. Pembiayaan Daerah	334 577 993	363 970 967	8 000 000
Jumlah	2 658 866 791	2 948 441 837	2 836 842 885

\*) Data APBD Kabupaten Pemalang

Lampiran 59  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 524 365 920	2 755 677 484	2 875 037 755
1. Pendapatan Asli Daerah	372 282 676	436 003 393	450 742 220
1.1. Pajak Daerah	107 035 473	122 808 450	136 475 102
1.2. Retribusi Daerah	17 833 906	25 207 740	31 720 116
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 576 925	22 395 197	15 570 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	234836372	265 592 006	266977002
2. Dana Perimbangan	1 513 203 330	1 586 668 848	1 653 021 467
2.1. Bagi Hasil Pajak	27 840 610	20 430 998	22 460 517
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 580 665	1 730 574	7 706 074
2.3. Dana Alokasi Umum	1 144 494 182	1 198 561 641	1 219 309 940
2.4. Dana Alokasi Khusus	339 287 873	365 945 635	403 544 936
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	638 879 914	733 005 243	771 274 068
B. Pembiayaan Daerah	119 976 862	60 034 997	30 767 498
Jumlah	2 644 342 782	2 815 712 481	2 905 805 253

\*) Data APBD Kabupaten Tegal



Lampiran 60  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 302 325 021	1 592 942 886	1 680 746 309
1. Belanja Pegawai	999 962 632	1 022 372 325	1 073 636 939
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	92 525 896	39 818 765	56 453 000
5. Belanja Bantuan Sosial	20 264 297	23 781 900	20 350 000
6. Belanja Bagi Hasil	9 012 448	8 243 114	22 000 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	176 423 672	498 725 282	502 306 370
8. Pengeluaran Tidak Terduga	4 136 076	1 500	6 000 000
B. Belanja Langsung	825 047 708	1 124 488 713	1 211 058 944
1. Belanja Pegawai	89 054 159	111 388 229	128 533 605
2. Belanja Barang dan Jasa	318 010 527	578 707 001	670 872 335
3. Belanja Modal	417 983 022	434 393 483	411 653 004
C. Pembiayaan Daerah	516 970 053	98 280 882	14 000 000
Jumlah	2 644 342 782	2 815 712 481	2 905 805 253

\*) Data APBD Kabupaten Tegal

Lampiran 61  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	2 854 043 939	3 096 826 845	3 129 412 939
1. Pendapatan Asli Daerah	346 907 973	379 091 299	398 649 681
1.1. Pajak Daerah	95 716 265	112 680 315	109 120 000
1.2. Retribusi Daerah	13 659 209	13 224 912	17 119 065
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 127 057	7 227 846	7 050 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	232405442	245 958 226	265360616
2. Dana Perimbangan	1 753 057 931	1 876 097 638	1 884 536 404
2.1. Bagi Hasil Pajak	28 692 252	27 428 663	30 652 103
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 967 863	1 666 439	1 520 246
2.3. Dana Alokasi Umum	1 321 798 057	1 373 396 371	1 381 401 958
2.4. Dana Alokasi Khusus	398 599 759	473 606 165	470 962 097
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	754 078 035	841 637 908	846 226 854
B. Pembiayaan Daerah	165 017 862	212 061 567	164 081 240
Jumlah	3 019 061 801	3 308 888 412	3 293 494 179

\*) Data APBD Kabupaten Brebes

Lampiran 62  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 619 226 066	1 753 675 758	1 869 441 738
1. Belanja Pegawai	1 012 025 233	1 018 639 658	1 097 880 031
2. Belanja Bunga	0	254 663	1 750 000
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	42 729 060	51 263 570	45 276 400
5. Belanja Bantuan Sosial	19 791 200	21 255 662	21 202 800
6. Belanja Bagi Hasil	10 339 494	10 569 844	12 172 252
7. Belanja Bantuan Keuangan	533 428 181	650 425 296	686 160 255
8. Pengeluaran Tidak Terduga	912 898	1 267 065	5 000 000
B. Belanja Langsung	1 206 137 936	1 378 575 983	1 401 552 441
1. Belanja Pegawai	59 499 455	58 146 328	63 989 734
2. Belanja Barang dan Jasa	619 480 026	698 510 124	801 121 247
3. Belanja Modal	527 158 455	621 919 531	536 441 460
C. Pembiayaan Daerah	193 697 799	176 636 671	22 500 000
Jumlah	3 019 061 801	3 308 888 412	3 293 494 179

\*) Data APBD Kabupaten Brebes

Lampiran 63  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	908 089 486	967 785 835	920 107 354
1. Pendapatan Asli Daerah	249 877 425	273 582 933	255 038 220
1.1. Pajak Daerah	34 283 039	40 432 697	36 159 000
1.2. Retribusi Daerah	5 642 334	6 942 061	5 350 129
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 693 814	9 098 846	9 982 607
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	201258238	217 109 329	203546484
2. Dana Perimbangan	570 455 641	574 099 279	563 537 121
2.1. Bagi Hasil Pajak	23 082 924	18 107 704	22 790 270
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 340 170	1 051 314	1 070 889
2.3. Dana Alokasi Umum	440 041 244	455 177 029	460 404 050
2.4. Dana Alokasi Khusus	105 991 303	99 763 232	79 271 912
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	87 756 420	120 103 623	101 532 013
B. Pembiayaan Daerah	184 727 835	134 421 683	86 000 000
Jumlah	1 092 817 321	1 102 207 518	1 006 107 354

\*) Data APBD Kota Magelang

Lampiran 64  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	280 174 190	288 817 756	350 807 934
1. Belanja Pegawai	262 442 805	274 269 057	318 379 205
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	10 447 285	11 693 479	25 938 141
5. Belanja Bantuan Sosial	6 623 398	2 290 240	2 554 364
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	660 702	563 200	0
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 780	3 936 224
B. Belanja Langsung	657 171 556	706 344 364	644 799 420
1. Belanja Pegawai	55 417 296	58 739 325	61 180 552
2. Belanja Barang dan Jasa	364 331 346	375 549 835	413 539 818
3. Belanja Modal	237 422 914	272 055 204	170 079 050
C. Pembiayaan Daerah	155 471 575	107 045 398	10 500 000
Jumlah	1 092 817 321	1 102 207 518	1 006 107 354

\*) Data APBD Kota Magelang

Lampiran 65  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 879 056 017	1 945 953 242	1 583 393 225
1. Pendapatan Asli Daerah	525 125 555	546 020 008	303 178 239
1.1. Pajak Daerah	339 929 156	360 053 930	176 325 076
1.2. Retribusi Daerah	57 024 071	55 288 239	46 424 363
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 258 541	13 346 411	14 262 173
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	115913787	117 331 428	66166627
2. Dana Perimbangan	1 090 922 294	1 110 329 047	1 027 576 863
2.1. Bagi Hasil Pajak	46 173 155	31 084 109	50 514 556
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 340 170	1 275 750	1 911 987
2.3. Dana Alokasi Umum	826 587 795	879 123 635	799 696 465
2.4. Dana Alokasi Khusus	216 821 174	198 845 553	175 453 855
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	263 008 168	289 604 187	252 638 123
B. Pembiayaan Daerah	226 307 401	188 661 439	41 002 017
Jumlah	2 105 363 418	2 134 614 681	1 624 395 242

\*) Data APBD Kota Surakarta

Lampiran 66  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	738 546 572	808 403 162	932 266 287
1. Belanja Pegawai	650 785 943	725 807 967	723 849 841
2. Belanja Bunga	232 996	129 348	28 000
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	64 500 976	63 341 922	46 734 100
5. Belanja Bantuan Sosial	20 146 134	18 082 477	8 093 162
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 030 901	794 123	999 500
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 849 622	247 325	152 561 684
B. Belanja Langsung	1 176 271 822	1 204 004 951	684 058 483
1. Belanja Pegawai	57 247 377	18 591 469	16 426 864
2. Belanja Barang dan Jasa	595 254 127	641 835 305	474 474 014
3. Belanja Modal	523 770 318	543 578 177	193 157 605
C. Pembiayaan Daerah	190 545 024	122 206 568	8 070 472
Jumlah	2 105 363 418	2 134 614 681	1 624 395 242

\*) Data APBD Kota Surakarta

Lampiran 67  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	889 992 411	928 019 899	967 665 251
1. Pendapatan Asli Daerah	208 926 057	236 086 898	228 004 915
1.1. Pajak Daerah	55 520 186	66 367 826	56 770 000
1.2. Retribusi Daerah	10 658 079	11 032 738	9 115 702
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 731 835	15 931 465	13 242 759
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	129015967	142 754 869	148876454
2. Dana Perimbangan	561 012 928	569 354 886	585 871 634
2.1. Bagi Hasil Pajak	23 076 287	17 560 657	21 821 106
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 341 711	1 304 804	1 072 544
2.3. Dana Alokasi Umum	448 067 710	469 967 335	475 828 296
2.4. Dana Alokasi Khusus	88 527 220	80 522 090	87 149 688
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	120 053 426	122 578 115	153 788 702
B. Pembiayaan Daerah	291 800 636	258 310 171	38 739 655
Jumlah	1 181 793 047	1 186 330 070	1 006 404 906

\*) Data APBD Kota Salatiga



Lampiran 68  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kota Salatiga  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	368 016 096	395 441 115	394 573 318
1. Belanja Pegawai	347 280 147	365 764 586	367 688 491
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	12 347 600	23 131 093	19 580 731
5. Belanja Bantuan Sosial	3 714 131	5 866 241	4 146 050
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	616 646	633 895	658 046
8. Pengeluaran Tidak Terduga	4 057 572	45 300	2 500 000
B. Belanja Langsung	555 522 142	547 246 311	611 831 588
1. Belanja Pegawai	61 222 579	84 463 175	100 148 743
2. Belanja Barang dan Jasa	272 277 581	279 058 495	332 299 874
3. Belanja Modal	222 021 982	183 724 641	179 382 971
C. Pembiayaan Daerah	258 254 809	243 642 644	0
Jumlah	1 181 793 047	1 186 330 070	1 006 404 906

\*) Data APBD Kota Salatiga

Lampiran 69  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	4 234 394 211	4 565 340 827	5 093 441 461
1. Pendapatan Asli Daerah	1 821 274 103	2 066 333 417	2 516 646 593
1.1. Pajak Daerah	1 331 817 746	1 561 698 568	1 826 948 813
1.2. Retribusi Daerah	107 791 110	113 680 850	277 142 244
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42 552 117	41 241 434	38 119 335
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	339113130	349 712 565	374436201
2. Dana Perimbangan	1 689 237 452	1 738 443 044	1 815 306 258
2.1. Bagi Hasil Pajak	167 389 858	112 727 955	140 013 671
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 394 502	1 367 400	1 334 578
2.3. Dana Alokasi Umum	1 190 422 387	1 317 186 595	1 299 131 994
2.4. Dana Alokasi Khusus	330 030 705	307 161 094	374 826 015
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	723 882 656	760 564 366	761 488 610
B. Pembiayaan Daerah	452 634 816	211 101 860	226 391 329
Jumlah	4 687 029 027	4 776 442 687	5 319 832 790

\*) Data APBD Kota Semarang

Lampiran 70  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	1 461 293 942	1 629 584 496	1 944 977 120
1. Belanja Pegawai	1 364 214 020	1 556 244 418	1 747 382 778
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	81 899 002	60 329 766	170 425 342
5. Belanja Bantuan Sosial	14 051 304	10 784 116	22 169 000
6. Belanja Bagi Hasil	1 129 616	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	0	1 177 790	0
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 048 406	5 000 000
B. Belanja Langsung	3 045 113 688	3 004 349 845	3 311 115 670
1. Belanja Pegawai	167 846 908	110 745 299	118 288 489
2. Belanja Barang dan Jasa	1 648 807 346	1 838 843 118	2 140 356 373
3. Belanja Modal	1 228 459 434	1 054 761 428	1 052 470 808
C. Pembiayaan Daerah	180 621 397	142 508 346	63 740 000
Jumlah	4 687 029 027	4 776 442 687	5 319 832 790

\*) Data APBD Kota Semarang

Lampiran 71  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	905 231 573	971 624 464	981 361 482
1. Pendapatan Asli Daerah	179 224 409	212 777 435	218 020 320
1.1. Pajak Daerah	70 561 334	87 578 474	85 250 000
1.2. Retribusi Daerah	15 985 706	16 667 656	18 290 820
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 920 239	6 101 173	6 363 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	86757130	102 430 132	108116500
2. Dana Perimbangan	586 379 795	610 332 821	632 390 293
2.1. Bagi Hasil Pajak	25 352 861	17 751 480	24 112 584
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 340 171	1 275 750	1 070 889
2.3. Dana Alokasi Umum	449 055 738	475 842 089	480 230 431
2.4. Dana Alokasi Khusus	110 631 025	115 463 502	126 976 389
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	139 627 369	148 514 208	130 950 869
B. Pembiayaan Daerah	78 606 609	92 028 389	78 746 000
Jumlah	983 838 182	1 063 652 853	1 060 107 482

\*) Data APBD Kota Pekalongan

Lampiran 72  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	343 504 024	361 973 835	402 074 005
1. Belanja Pegawai	306 471 304	319 284 305	356 937 005
2. Belanja Bunga	0	6 803	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	22 446 204	29 310 400	39 728 500
5. Belanja Bantuan Sosial	11 865 819	11 920 375	2 648 500
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	798 881	721 513	760 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 921 816	730 439	2 000 000
B. Belanja Langsung	539 680 871	592 423 178	653 783 477
1. Belanja Pegawai	46 060 061	71 614 035	73 629 906
2. Belanja Barang dan Jasa	347 238 219	338 655 158	372 767 474
3. Belanja Modal	146 382 591	182 153 985	207 386 097
C. Pembiayaan Daerah	100 653 287	109 255 840	4 250 000
Jumlah	983 838 182	1 063 652 853	1 060 107 482

\*) Data APBD Kota Pekalongan

Lampiran 73  
 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal  
 Menurut Jenis Penerimaan (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	987 244 236	1 036 963 763	1 132 970 758
1. Pendapatan Asli Daerah	275 021 448	285 575 789	333 012 742
1.1. Pajak Daerah	83 852 211	89 361 925	93 763 370
1.2. Retribusi Daerah	17 402 003	19 087 354	26 857 084
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 530 831	8 575 641	10 729 217
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	170236403	168 550 869	201663071
2. Dana Perimbangan	602 567 259	641 682 768	691 357 253
2.1. Bagi Hasil Pajak	24 231 303	17 635 546	24 175 331
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 340 170	1 275 750	1 070 889
2.3. Dana Alokasi Umum	482 150 715	502 969 026	512 935 790
2.4. Dana Alokasi Khusus	94 845 071	119 802 446	153 175 243
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	109 655 529	109 705 206	108 600 763
B. Pembiayaan Daerah	106 373 126	165 508 164	165 060 342
Jumlah	1 093 617 362	1 202 471 927	1 298 031 100

\*) Data APBD Kota Tegal

Lampiran 74  
 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal  
 Menurut Jenis Pengeluaran (ribuan Rp), 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Tidak Langsung	390 547 950	399 681 170	473 534 490
1. Belanja Pegawai	374 307 036	383 397 283	445 609 082
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	15 282 747	12 031 437	20 555 841
5. Belanja Bantuan Sosial	215 000	3 581 950	4 660 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	650 967	670 500	709 567
8. Pengeluaran Tidak Terduga	92 200	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	526 182 839	646 894 043	804 858 610
1. Belanja Pegawai	93 912 239	92 656 453	94 430 134
2. Belanja Barang dan Jasa	318 648 091	388 259 566	527 988 798
3. Belanja Modal	113 622 509	165 978 024	182 439 678
C. Pembiayaan Daerah	176 886 573	155 896 714	19 638 000
Jumlah	1 093 617 362	1 202 471 927	1 298 031 100

\*) Data APBD Kota Tegal



Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241  
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195  
Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : [jateng@bps.go.id](mailto:jateng@bps.go.id)

ISSN 2407-344X

